Soegiri DS
Edi Cahyono

GERAKAN SERIKAT BURUH

Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru

HASTA MITRA
penerbit buku bermutu

GERAKAN SERIKAT BURUH

Oleh: Soegiri DS.

Kata Pengantar

Serikat buruh yang muncul pada tingkat awal kapitalisme adalah sebuah organisasi yang menghimpun massa kaum buruh untuk perbaikan nasib. Sebagai gerakan yang berada di dalam masyarakat yang bersendikan kapitalisme, jangkauan serikat buruh pada dasarnya tidak melampaui batas perbaikan kepentingan ekonomi dan sosial kaum buruh. Serikat buruh menangani juga tuntutan-tuntutan dan aksi-aksi politik. Namun karena berada di dalam masyarakat yang belum bebas dari sistem kapitalisme, gerakan serikat buruh tidak keluar dari batas gerakan reform. Meskipun ada gerakan serikat buruh, keuntungan kapitalis tetap bisa berlimpahan, produksinya tidak terhenti dan kualitasnya sebaliknya dari bertambah jelek.

Di dalam gerakan nasional di dunia Barat, serikat buruh terseret pada gerakan mematangkan batas daerah nasional untuk kepentingan pasar ekonomi kapitalis sebagai landasan pengembangan kapitalisme. Beda dengan di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan dulu. Serikat buruh di negeri-negeri ini berpartisipasi pada perjuangan nasional melawan imperialisme dalam pengejawantahan kolonialisme dan neo kolonialisme. Gerakan serikat buruh di negeri-negeri bekas jajahan dan setengah jajahan, pada dewasa ini masih berhadap-hadapan dengan kapital monopoli luar, terutama Amerika, meskipun negerinya formal merdeka.

Munculnya gerakan Sosialis di Barat, ada yang mendahului dan

ada pula yang membelakangi gerakan serikat buruh. Namun pengalaman di Barat menunjukkan, bahwa baik yang di dalam sejarah mendahului maupun membelakangi, dari gerakan serikat buruh dewasa ini tidak muncul banyak kader dan pemimpin yang benar-benar gigih bersedia menyumbangkan diri untuk perjuangan revolusioner. Yang berdominasi adalah kelibatan diri dalam menangani gerakan serikat buruh yang hanya mengapung pada niveau reformisme. Kader-kader dan pemimpin-pemimpin serikat buruh sebagian ada yang dengan terus-terang menolak membimbing kaum buruh memasuki perjuangan revolusioner. Sebagian lagi ada yang menutup-nutupi pendiriannya yang reformis dengan berdalih tentang "kenetralan politik" serikat buruh. Kader-kader dan pemimpin-pemimpin di Barat tadi tidak sedikit yang berposisi sebagai birokrat-birokrat komplemen kapitalis yang berperangai Aristokrasi Buruh. Di waktu perang, sementara pemimpin-pemimpin tertingginya malah aktif menganjurkan peperangan dan menempatkan diri sebagai socio-imperialis.

Untuk Indonesia adalah penting dan urgen perlunya pembenahan gerakan serikat buruh. Gerakannya perlu dipicukan pada sasaran yang kena dengan pengutamaan kapitalis-kapitalis monopoli asing, kapitalis-kapitalis birokrat serta kapitalis-kapitalis domestik yang merusak kehidupan dan perkembangan ekonomi nasional. Gerakan serikat buruh Indonesia memerlukan kader-kader yang teguh membela kepentingan pokok dan aspirasi kelas buruh, terutama kader-kader muda, sehingga serikat buruh Indonesia tidak hanya mandeg sebagai aparat birokrasi yang hakekatnya anti kelas buruh. Indonesia mempunyai urgensi untuk terben-tuknya negara demokratis yang mandiri di bidang politik, ekonomi dan militer. Suatu negara yang berprinsip pada penggalangan hubungan kerjasama dan saling bantu dengan negara-negara lain di dunia yang berpola sama, yang menjamin tercapainya Demokrasi sejati sebagai kekuasaan politik yang berpadu dengan Sosialisme. Gerakan serikat buruh berkewajiban mendukung negara semacam itu.

Soegiri DS.

1. Gerakan serikat buruh dan prospek perjuangan kelas buruh

Munculnya kehidupan serikat buruh adalah pada tingkat awal kapitalisme. Bertolak dari kepentingan langsung untuk perbaikan syarat-syarat ekonomi dan sosial bagi kehidupan kaum buruh, kaum buruh menyatukan diri dalam wadah organisasi berupa serikat buruh. Di dalam masyarakat kapitalis, pentingnya menyatukan diri adalah karena kaum buruh menghadapi kekuatan-kekuatan yang berpotensi unggul. Kendati tidak keluar dari jangkauan kapitalisme, serikat buruh yang baru saja muncul dan bergerak, sudah menghadapi tindakan-tindakan represif pihak majikan-majikan kapitalis dan pemerintahan-pemerintahan burjuis. Bukan kejadian yang langka, bahwa di dalam masyarakat kapitalis, aparat kekuasaan baik militer maupun polisi dikerahkan untuk menggagalkan aksi-aksi kaum buruh yang diorganisasi oleh serikat buruh. Gejala yang demikian pada umumnya berlatar belakang kekhawatiran pihak burjuasi, bahwa gerakan serikat buruh akan melahirkan perjuangan revolusioner kelas buruh menggulingkan kekuasaan negara burjuis untuk mengakhiri kapitalisme.

Dengan berkembangnya kapitalisme, berkembang pula jumlah kaum buruh sebagai penjual tenaga kerja. Tugas-tugas yang membebani serikat buruh pun semakin bertambah banyak dan semakin bervariasi. Lama kelamaan tuntutan-tuntutan dan aksi-aksi kaum buruh yang diorganisasi oleh serikat buruh semakin melewati jangkauan lama. Walaupun pangkal bertolaknya kepentingan pokok yang berbeda, menghadapi serikat-buruh yang semakin kuat dan berpengalaman, majikan-majikan dan pemerintahan-pemerintahan burjuis terpaksa bertoleransi dalam batas tidak terkutiknya hubungan produksi kapitalis. Perundingan-perundingan yang berjalan alot atau hanya berupa formalitas yang didasari dengan rekayasa, terutama bagi industri-industri maju, banyak yang membuahkan Perjanjian-Perjanjian Kolektif dengan majikan (Di Indonesia sekarang disebut Kesepakatan Kerja Bersama—KKB). Isinya tidak saja meliputi upah, jam/waktu kerja dan syarat-syarat kerja dalam bentuknya yang lama, tapi juga segi-segi “kemanfaatan” lainnya bagi kaum buruh yang lebih mendetail seperti hak libur setiap tahun, hak libur di waktu hamil bagi buruh

wanita, pendidikan, peru-mahan, asuransi kesehatan, kompensasi pengangguran dan perlindungan di hari tua berupa pensiun. Ada juga sebuah organisasi internasional yang merupakan kerja-sama antara buruh, majikan dan pemerintah. Itulah ILO (International Labour Organisation—Organisasi Buruh Internasional), sebuah badan PBB (*specialised agency*) yang beranggotakan negara dan berkedudukan di Swis. ILO membuat konvensi-konvensi mengenai masalah-masalah perburuhan, kebebasan kaum buruh berorganisasi dan hak-hak azasi manusia. Konvensi-konvensi ILO tidak bersifat mengikat bagi negara-negara anggota, tapi banyak negara-negara anggota yang meratifikasinya. Meskipun menampung juga keanggotaan negara-negara Sosialis, yang menjadi tekanan adalah non Sosialis di atas prinsip yang disebut indAustrial relation (hubungan indAustrial). Yaitu hubungan "damai" antara kaum buruh dan kaum kapitalis. Di Indonesia, terutama selama apa yang disebut dengan Orde Baru, sebagai bentuk penipuan terhadap adanya penghisapan terhadap kaum buruh, hubungan "damai" itu dipulas dengan rumus "hubungan perburuhan Pancasila". Kaum buruh dikatakan berkepentingan mendukung majikan. Dengan bekerja lebih produktif katanya kaum buruh dimungkinkan memperoleh pendapatan yang lebih besar guna meningkatkan "kesejahteraan" hidup bersama keluarga. Untuk lamis-lamisnya, berdasarkan apa yang disebut sebagai prinsip kemitraan (*partnership*), majikan juga dianjurkan supaya memandang kaum buruh sebagai mitra dalam produksi barang dan jasa. Maka dikatakan lebih lanjut, bahwa kaum buruh supaya diperlakukan sebagai mitra dalam pembagian keuntungan. Semua itu adalah palsu dan penderitaan yang dirasakan langsung oleh kaum buruh sebagai akibat penghisapan tidak bisa ditutup-tutupi.

Banyak sengketa-sengketa antara serikat buruh dan majikan atau pemerintahan burjuis yang bisa melahirkan persetujuan atau kompromi dengan hanya melalui perundingan. Namun untuk dapat melahirkan persetujuan atau kompromi, tidak sedikit perundingan-perundingan yang menemui jalan buntu. Karenanya supaya bisa mencapai persetujuan atau kompromi, oleh serikat buruh banyak diorganisasi pemogokan sebagai bentuk aksi kekerasan. Untuk mematahkan pemogokan, terutama pihak majikan menggunakan beberapa cara. Misalnya mengerahkan gerombolan "pematah pemogokan" (*strike breakers* atau *staking*

brekers), menutup perusahaan (*lock out*) atau tidak mau membayar upah buruh selama waktu mogok. Yang digunakan oleh majikan bisa hanya satu di antara tiga contoh di atas, dua di antaranya atau ketiga-tiganya serempak bersama-sama.

Dalam rangka merongrong persatuan, melunakkan atau jika mungkin melumpuhkan gerakan serikat buruh, majikan-majikan dan pemerintahan-pemerintahan burjuis menghalalkan pelbagai macam cara. Misalnya sebagai politik memecah-belah, di dalam satu kesatuan industri atau kesatuan administrasi pemerintahan, secara singkat bisa disebut kesatuan lapangan kerja, yang diakui oleh majikan dan pemerintahan burjuis tidak hanya satu serikat buruh saja. Sebagai dalih dikatakan menghormati "Demokrasi" dan mematuhi perundang-undangan negara. Tentu saja demokrasi burjuis dan perundang-undangan negara hasil rekayasa burjuasi. Umpamanya dalam satu kesatuan industri, bagi kaum buruh pabrik (*blue collar workers*) yang diakui hanya serikat buruh yang mewakili kaum buruh pabrik saja. Bagi pegawai kantor (*white collar workers*) yang diakui hanya organisasi pegawai-pegawai kantor yang berdiri sendiri, terpisah dari serikat buruh kaum buruh pabrik. Begitu juga bagi para mandor. Organisasi kesatuannya yang diakui terpisah dari serikat buruh kaum buruh pabrik dan organisasi pegawai-pegawai kantor. Maka dalam perundingan masing-masing kesatuan organisasi maju sendiri-sendiri, terpisah antara satu sama lain. Dengan dalih yang sama seperti di atas, bukanlah masalah yang tidak umum bahwa majikan-majikan, begitu juga pemerintahan-pemerintahan burjuis yang memanfaatkan perundang-undangan negara hasil rekayasa, menjamin berdirinya lebih dari satu serikat buruh di dalam satu pabrik. Misalnya dengan dalih mencegah "otoriterisme", di Indonesia masalah itu dijamin dengan UU No. 25/1997 dan Konvensi ILO No. 87 yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, tergantung pada kepentingan burjuasi yang terutama berkuasa, pengorganisasian lebih dari satu serikat buruh dalam satu kesatuan lapangan kerja malah dilarang. Jika adanya satu serikat buruh dalam satu kesatuan lapangan kerja bisa menjamin "hubungan damai" antara kaum buruh dan pemerintah beserta majikan-majikan kapitalis, adanya lebih dari satu serikat buruh dalam satu kesatuan lapangan kerja justru dianggap merugikan. Hal itu seperti yang dipraktekkan di Korea Selatan dengan larangan yang dirumuskan di dalam Undang-

Undang Serikat buruh (*Trade Union Act*) pasal 3. Di Swedia, sebagai Gabungan Serikat buruh yang menghimpun massa kaum buruh industri, yang resmi diakui oleh pemerintah adalah LO (*Landsorganisation*—Gabungan Serikat buruh). Dengan pengakuan resmi itu, aksi mogok yang dilakukan di luar pengorganisasian LO atau serikat-serikat buruh anggotanya, dinyatakan sebagai aksi liar. Di samping cara-cara di atas, burjuasi tidak juga menyia-nyiakan peluang untuk menye-lundupkan agen-agennya di dalam serikat buruh. Yang disasar bisa pimpinan serikat buruh atau mengor-ganisasi serikat buruh saingan yang umumnya dikenal sebagai serikat buruh "kuning." Terutama di Barat, pemimpin-pemimpin serikat buruh banyak yang menjadi birokrat, hidupnya baik dan hanyut dalam arus pikiran yang tak ada ubahnya seperti lapisan buruh Aristokrat (Ningrat). Itulah yang menjadi titik-tolak dilanggarnya prinsip-prinsip demokratis oleh para pemimpin itu untuk mematikan partisipasi aktif dan inisiatif massa kaum buruh anggota di dalam kehidupan serikat buruh.

Tanpa mengurangi keuntungan yang semakin berlimpahan, majikan-majikan kapitalis berindustri maju di Barat, berkepentingan dan mampu menarik lapisan luas kaum buruh, terutama yang mempunyai keahlian, dengan jaminan materiil yang baik. Hal itu yang menjadi materi dasar bagi tumbuhnya lapisan buruh Aristokrat. Inggeris terkenal sebagai lahan yang subur bagi adanya lapisan buruh Aristokrat, terutama pada massa jayanya ketika masih menguasai tanah-tanah jajahan yang tersebar luas di seluruh dunia. Kendati gerakan serikat buruh berlangsung terus dan sengketa-sengketa tidak berhenti bergejolak karena perbedaan kepentingan pokok antara kelas buruh dan burjuasi, keuntungan yang diperoleh dari hasil nilai lebih sebagai buah penghisapan kaum kapitalis terhadap kaum buruh tidak mengurang. Kualitas produksi sebaliknya dari bertambah jelek justru malah membaik. Sampai pada saat ini, terutama di Barat yang maju industrinya, keadaan yang demikian masih tetap bisa dimanfaatkan oleh kaum kapitalis dan pemerintahan-pemerintahan burjuis dalam rangka mempertahankan sistem kapitalisme.

Negeri-negeri Barat pada umumnya tidak juga mengindikasikan adanya gerakan revolusioner yang kuat. Kaum buruh di Barat pada umumnya tidak merasakan sentuhan kemiskinan hidup. Kader-

kader dan pemimpin-pemimpin serikat buruh pada umumnya adalah birokrat-birokrat yang hanya melibatkan diri pada kesibukan-kesibukan tambal-sulam yang menjadi kepentingan langsung kaum buruh. Syarat-syarat obyektifnya tidak berpeluang baik bagi munculnya partai kelas buruh yang militan, yang berkemampuan cukup mendidik, memo-bilisasi dan memimpin massa kaum buruh dalam perjuangan revolusioner merombak sistem kapitalisme. Reformisme adalah sebuah aspek yang mendominasi gerakan buruh pada umumnya di Barat.

Belakangan ini angin politik kanan Eropa Barat berimbas lebih kencang. Yang menggemparkan adalah suara yang diperoleh oleh partai ekstrem kanan di Perancis dalam pemilihan presiden. Yaitu partai Front National di bawah pimpinan Jean-Marie Le Pen. Semboyan Le Pen yang menonjol ialah "Perancis untuk orang-orang Perancis, dan bukan untuk orang-orang pendatang." Jika ia menang dalam pemilihan, ia akan menarik Perancis dari keanggotaan Uni Eropa dan dari penggunaan uang Euro. Di dalam putaran pertama pemilihan presiden, Le Pen berhasil meraih 17% suara, nomor dua sesudah Jaques Chirac, kanan Konservatif, yang masih berkedudukan sebagai presiden. Hanya di dalam putaran kedua Le Pen dapat dikalahkan mutlak oleh Chirac. Chirac meraih 81,96% suara, hasil terbesar sejak berlangsungnya pemilihan presiden langsung, sedang Le Pen 18,04 %. Kemenangan mutlak Chirac adalah karena kekuatan-kekuatan "kiri," terutama partai Sosialis dan partai Komunis "De-Stalinis" bergabung menjadi satu mendukung Chirac. CGT (*Confédération Generale du Travail*—Gabungan Serikat buruh terbesar di Perancis yang pimpinannya umumnya terdiri dari kader-kader Komunis "De-Stalinis") bersama-sama dengan empat Gabungan Serikat buruh Perancis lainnya ikut juga berpartisipasi mendukung Chirac. Empat Gabungan serikat buruh Perancis di luar CGT adalah CFDT (*Confédération Francaise Democratique du Travail*—Sosialis), nomor dua besarnya sesudah CGT, CFTC (*Confédération Francaise des Travaileurs Chrétiens*—Kristen), FO (*Force Ouvrière*—independen) dan UNSA (*Union Nationale des Syndicats Autonomes*—otonom). Lima Gabungan Serikat buruh tadi berafiliasi pada ETUC (*European Trade Union Confederation*—Gabungan Serikat buruh Eropa), dalam bahasa Perancisnya CES (*Confédération Europëene des Syndicats*).

Perkembangan yang menyusul di dalam waktu singkat menunjukkan, bahwa gabungan partai-partai tengah-kanan yang mengitari Chirac mencapai kemenangan mutlak dalam pemilihan parlemen. Yaitu dari 577 kursi meraih 399 kursi. Gabungan partai-partai kiri dari 314 kursi merosot menjadi 175 kursi. Partai Front Nasional tidak mendapatkan apa-apa. Jadi meskipun kekuatan ekstrem kanan bisa dikalahkan, yang menggondol kemenangan akhirnya gabungan kekuatan-kekuatan tengah-kanan dengan Chirac sebagai pemimpin utama. Menanjaknya suara pendukung Le Pen dalam putaran pertama pemilihan presiden, terutama karena golongan Chirac oleh orang banyak diketahui korup. Meskipun perdana menteri Lionel Jospin mengetahuinya, tapi ia diam saja. Di samping di Perancis, gabungan partai-partai tengah-kanan yang pada saat hampir bersamaan waktunya memenangkan pemilu adalah di Italia, Portugal dan Denmark. Di samping itu yang hasilnya juga sensasional adalah di Negeri Belanda. Hasil pemilu ini berarti kemenangan kekuatan-kekuatan politik tengah-kanan Belanda yang mengisi kekosongan Liberalisme di dalam kekuasaan pemerintahan selama delapan tahun. Di Tweede Kamer (parlemen), CDA (*Christen Democratisch Appel*—Kristen Demokrat—Konservatif) mendapatkan 43 kursi yang berarti tambahan 15 kursi dari seluruhnya 150 kursi. Yang dalam jumlah menempati nomor dua adalah sebuah partai yang berada di bawah pimpinan Pim Fortuyn, terkenal dengan sebutan LPF (Lijst Pim Fortuyn-Liberal), dengan 26 kursi. Partai Buruh, partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Wim Kok bersama-sama dengan dua partai lainnya dalam pemerintahan koalisi, dari jumlah keseluruhan 97 kursi merosot menjadi 54 kursi. Menjelang pemilihan, pada tanggal 6 Mei 2002, Pim Fortuyn dibunuh oleh seorang pembunuh tunggal. Sebagai terdakwa adalah Volkert van der Graaf, seorang Belanda. Pim Fortuyn dikubur di Italia. Di atas batu nisan kuburannya ditulis "Loquendi libertatem custodiamus." Lebih kurang berarti "Bela kebebasan mengutarakan pikiran". Pemerintahan baru sebagai aliansi tengah-kanan yang terdiri dari tiga partai, menduduki 92 kursi. Tiga partai itu ialah: CDA (Konservatif), LPF (Liberal) dan VVD (*Volkspartij voor Vrijheid en Democratie*—Liberal). Di bagian Eropa Barat lainnya ada lagi partai-partai yang politiknya bernada sama seperti partai Front Nasional di Perancis, yaitu seperti yang di Austria, Denmark dan Norwegia. Adapun sandaran partai-partai

ekstrem kanan pada umumnya adalah golongan tengah-kecil. Bertambahnya suara partai-partai ekstrem kanan di Eropa Barat terutama karena semakin banyaknya orang-orang pendatang dari luar yang dianggap mendesak sumber penghidupan orang-orang pribumi dan merajalelanya kriminalitas. Di samping itu, seperti yang di Negeri Belanda, orang-orang pendatang dari luar yang terutama tidak disukai oleh kebanyakan penduduk pribumi adalah orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim dinilai enggan menyesuaikan diri dengan kebiasaan hidup orang-orang pribumi dan pantang berasimilasi dengan masyarakat. Di samping itu dengan disinyalirnya organisasi Al Qaeda melakukan teror di banyak tempat di dunia, di negeri-negeri Barat martabat orang-orang Muslim menjadi bertambah tidak baik. Dampak fenomena ini menjadi penyebab lengsernya Pemerintahan Wim Kok di Negeri Belanda, kendati selama dua tahun terakhir di bawah pemerintahan ini, di Negeri Belanda terjadi perkembangan ekonomi kapitalis yang paling pesat ketimbang kebanyakan negeri-negeri Eropa lainnya.

Gerakan serikat buruh di Barat memang ada perannya dalam aksi-aksi politik. Misalnya aksi-aksi serikat buruh di Amerika Serikat mendukung pemilihan presiden. Aksi-aksi serikat buruh di Eropa Barat mendukung gerakan-gerakan menuntut perubahan pemerintahan atau pergantian undang-undang yang dianggap merugikan bagi kepentingan kaum buruh. Walaupun aksi-aksinya sampai memuncak dalam bentuk pemogokan, tapi sistem masyarakatnya yang kapitalis tidak terkutik-kutik. Beda dengan aksi-aksi politik serikat buruh mendukung dan memperkuat revolusi Sosialis merombak sistem masyarakat kapitalis dan menggantinya dengan sistem masyarakat Sosialis.

Sejak awal gerakan nasional di Barat, gerakan serikat-buruh ikut berpartisipasi. Tumbuhnya nasionalisme di Eropa Barat dan di Amerika bertolak dari prinsip kebutuhan akan pemagaran daerah untuk pasar ekonomi kapitalis. Gerakan serikat buruh yang tidak terlepas dari arus produksi kapitalis, pada masa tersebut pun tidak berada di luar gerakan nasional. Pada mulanya gerakan nasional di Barat berselar kiri, sesuai dengan pertumbuhan kapitalisme dalam proses mendongkel feodalisme. Namun dengan semakin tajamnya kontradiksi antara burjuasi dan kelas buruh, selar kiri

nasionalisme di Barat menjadi luntur. Akhirnya menjadi kanan dan memanifestasikan diri sebagai sovinisme. Dengan berkembangnya waktu, kapitalisme dalam bentuknya yang lama menjadi tidak lagi relevan. Kapitalisme kemudian memuncak menjadi imperialisme, dan dalam pengejawantahan kolonialisme menjajah negeri lain atau negeri-negeri lain lebih dari satu, di luar batas negara nasional. Manifestasi sovinisme tercermin pada sikap tokoh-tokoh penting gerakan serikat buruh di Barat pada masa perang. Pemimpin-pemimpin serikat-buruh seperti Samuel Gompers dari Amerika Serikat, Ernest Bevin dari Inggeris, Sorel dari Perancis sebagai tokoh penganut anarko sindikalisme, dan Carl Legien dari Jerman, mereka berdiri di belakang pemerintah mereka masing-masing sebagai penganjur peperangan. Mereka mempertahankan imperialisme sesuai dengan versi dan kebutuhan negara mereka. Dengan ikut aktif mempropagandakan peperangan, mereka menempatkan diri sebagai *socio imperialis*. Mereka memotong hubungan setiakawan proletariat internasional dengan mengadu-domba kaum buruh berbagai negeri untuk saling bunuh-membunuh. Yang mereka bela adalah kepentingan musuh bersama kelas buruh, yaitu kaum pemilik modal monopoli berskala dunia. Kepedulian terhadap penderitaan rakyat negeri-negeri jajahan sebagai akibat peperangan bagi mereka tidak ada. Sebagai bentuk iming-imingan yang bersifat menipu, mereka berpropaganda bahwa dengan menang perang industri kapitalis akan tetap hidup dan berkembang sebagai sumber kemakmuran hidup kaum buruh di negeri-negeri penjajah.

Bagaimana keadaan di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan dulu? Kelas buruh di negeri-negeri ini lahirnya lebih belakangan ketimbang di Eropa Barat dan di Amerika Serikat. Pada awal perkembangannya, obyek utama gerakan serikat buruh adalah perusahaan-perusahaan modal monopoli asing dan kekuasaan politik penjajah. Burjuasi domestik yang masih lemah digencet juga oleh burjuasi besar pemilik perusahaan-perusahaan modal monopoli asing dan oleh pemerintahan penjajah. Burjuasi domestik bukan sasaran pokok gerakan serikat buruh. Golongan intelektual di kalangan burjuasi domestik banyak yang menjadi penganjur nasionalisme. Yaitu nasionalisme yang dalam pertumbuhannya mempunyai karakter berbeda dengan nasionalisme di Barat. Jika di Barat menjadi sandaran berkembangnya kapitalisme, di negeri-

negeri ini melawan kapitalisme yang sudah memuncak menjadi imperialisme, yang sudah melebarkan sayapnya dengan memaksa negeri-negeri lain untuk dijajah. Maka serikat buruh-serikat-buruh ikut berpartisipasi dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional. Sebagian yang dipimpin oleh kader-kader dan pemimpin-pemimpin Sosialis atau Komunis, serikat buruh merupakan panjatan bagi terbentuknya partai kelas buruh. Sebuah partai politik yang program pokoknya meneruskan perjuangan kemerdekaan nasional ke arah teruwujudnya masyarakat Sosialis. Di Indonesia misalnya, VSTP merupakan panjatan bagi terbentuknya partai politik ISDV yang kemudian menjadi PKI. VSTP adalah singkatan dari "*Vereniging van Spoorweg en Tram Personeel*" (Perserikatan Pekerja Kereta-api dan Trem). Sedang ISDV singkatan dari "*Indische Sociaal Democratische Vereniging*" (Perserikatan Sosial Demokratis Indonesia).

Adanya gerakan dan kecenderungan disintegrasi nasional kini merupakan masalah akut di Indonesia. Pada umumnya muncul di daerah-daerah yang kaya akan sumber alam yang vital seperti Aceh, Irian Barat, Riau, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Motif formal yang menonjol bagi disintegrasi dari wilayah Indonesia adalah kekejaman militer. Namun, jika berbicara tentang gerakan disintegrasi nasional, perlu dilihat segi penggerak dan latar belakangnya. Bagi masalah Aceh misalnya bisa dilihat adanya orang-orang dan golongan-golongan yang menginginkan kembalinya kekuasaan feodal setempat di samping pamrih menguasai sumber alam yang vital. Maka andaikatapun kekejaman militer rezim Indonesia bisa teratasi, jaminan tidak ada bagi terhapusnya penindasan lebih lanjut terhadap rakyat sesudah kaum penggerak disintegrasi nasional berkuasa. Keutuhan wilayah Indonesia berdasarkan Sumpah Pemuda th. 1928 sebagai daerah nasional yang merangkumi kesatuan bahasa, kesatuan teritorial, kesatuan ekonomi, homogenitas kebudayaan yang multidimensional dan kesamaan nasib pernah dijajah bersama di bawah kolonialisme Belanda, perlu dipertahankan sebagai prinsip. Kesatuan ethnik yang tidak jelas batas wilayahnya dan batas daerah kekuasaan feodal yang tidak menentu, bukan motif yang mempunyai kekuatan obyektif untuk dijadikan sebagai alasan bagi disintegrasi nasional. Membiarkan disintegrasi nasional berarti membiarkan berkeping-kepingnya daerah-daerah yang sebelumnya

berada di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Keadaan yang demikian memberikan kemudahan bagi campur tangan dan dominasi ekonomi, politik sampai pun militer, imperialisme dunia. Dalam hubungan itu hanya kaum separatis yang bisa ikut menikmati keuntungan, setidaknya parsial, dari kekuasaan yang mereka peroleh, tapi bukan rakyat biasa. Yugoslavia yang terpecah-pecah menjadi beberapa negara tersendiri adalah contoh hidup. Pengerahan kekuatan militer rezim Soeharto dan penerusnya menindas rakyat dengan kekerasan yang berdalih membela dan mempertahankan integritas Indonesia adalah palsu dan menindas rakyat. Latar belakangnya kepentingan pribadi, keluarga dan golongan dengan menguras kekayaan alam Indonesia, di samping memanfaatkan bagian keuntungan dari investasi dan perdagangan modal monopoli asing. Beda secara prinsip dengan perjuangan bersenjata rakyat Indonesia, begitu pula dengan pemanfaatan kekuatan militer Republik sesudah proklamasi kemerdekaan. Hal itu adalah adil dan benar. Sebab tujuannya membela serta memperjuangkan kedaulatan dan integritas nasional yang meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Disintegrasi nasional bukan alternatif untuk membebaskan diri dari kekejaman militer dan otoriterisme pemerintah pusat Indonesia. Maka bagi Indonesia, penyelesaian tingkat pertama yang baik dalam mengatasi disintegrasi nasional adalah jalan damai di bawah pemerintahan Demokratis. Tingkat penyelesaian selanjutnya tergantung pada perkembang-an situasi dan kondisi kongkritnya. Adapun pemerintahan Demokratis yang dimaksudkan adalah sebuah pemerintahan yang berlandasan pada Persatuan Nasional Demokratis dengan kelas buruh di bawah pimpinan partainya sebagai tulang punggung yang bersatu dengan kaum tani. Yaitu sebuah pemerintahan Demokratis yang berpolitik bebas serta bersih dari militerisme, mandiri di bidang ekonomi dengan sistem pembagian kekayaan nasional yang adil dan merata bagi kepentingan seluruh rakyat. Serikat buruh berkepentingan menyokong pemerintahan kategori di atas dan ikut aktif berpartisipasi melancarkan implementasi programnya.

Di negeri-negeri yang sekarang di sebut sedang berkembang, kelas buruh semakin kuat, demikian juga burjuasi domestik. Berdasar atas kepentingan pokok yang berbeda antara dua kelas sosial itu, dengan maksud melemahkan atau jika mungkin melumpuhkan

perjuangan kelas buruh, kaum imperialis berkepentingan mengadu domba keduanya sambil merangkul burjuasi domestik. Karena kolonialisme dalam bentuk lamanya sudah tidak lagi populer dan tidak dapat dipertahankan, sandaran utama kaum imperialis adalah burjuasi domestik yang memegang kekuasaan politik, yang bersedia menjadi penyalur kepentingan kaum imperialis, terutama di bidang ekonomi. Untuk melapangkan jalan bagi pelaksanaan politik imperialisme itu, serikat buruh sebagai organisasi massa yang dipimpin oleh kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berhaluan Komunis atau Sosialis ditekan dan diisolasi. Kader-kader dan pemimpin-pemimpin itu bahkan termasuk yang dibasmi bersamaan dengan dibasminya pemimpin-pemimpin partai kelas buruh. Teror putih pemerintah Hatta dalam peristiwa Madiun th. 1948 dan pembantaian besar-besaran rezim diktatur militer Soeharto th.1965 sebagai teror putih yang lebih dahsyat lagi, adalah bukti-bukti kenyataan sejarah yang terjadi di Indonesia. Dua teror putih di atas mencerminkan kesamaan sebagai aspek pokok. Namun jika dilihat dari haluan politik Hatta dan Soeharto, di samping adanya kesamaan, ada perbedaannya. Perkembangan situasi sesudah perjanjian KMB (Konperensi Meja Bundar) ditanda-tangani mengindikasikan, bahwa sebagai seorang Sosial Demokrat, Hatta tidak berpendirian melarang Partai Komunis dan penyebaran Marxisme seperti halnya Soeharto yang berpijak pada kediktaturan militer. Pendirian Hatta sesuai dengan politik umum Sosial Demokrasi yang memberikan kelonggaran demokratis selama sistem kapitalisme masih bisa dipertahankan dan belum ada ancaman bahaya untuk menjadi bangkrut. Yaitu kelonggaran demokratis yang dimanfaatkan untuk menanamkan ilusi pada pikiran orang banyak, bahwa kapitalisme "bukan penghisapan," sedang eksistensinya bersifat "natural dan abadi." Terutama pada saat kehidupan ekonomi kapitalis berada pada gelombang pasang, seperti yang terjadi di Barat pada umumnya, politik Sosial Demokrasi muncul dengan menampilkan perbaikan relatif bagi penghidupan kaum buruh dan rakyat. Namun perbaikan relatif itu pun tidak langgeng selama sistem kapitalisme tidak mampu menghindarkan diri dari serangan krisis. Itulah tadi perbedaan antara pendirian Hatta dan Soeharto. Bagaimanapun juga perbedaan itu bukan pencerminan aspek pokok. Aspek pokoknya terletak pada kesamaan politik Hatta dan Soeharto yang anti

Komunis, anti Demokrasi sejati, tapi tidak anti Demokrasi burjuis. Demokrasi sejati adalah Demokrasi sebagai kekuasaan politik rakyat yang berpadu dengan Sosialisme.

Gerakan Sosialis yang berjiwa internasionalisme proletar dan kemenangan front demokratis atas fasisme dalam Perang Dunia II, ada dampaknya terhadap gerakan serikat buruh. Dampak kongkritnya antara lain berupa sebuah gagasan tentang perlunya ada federasi serikat buruh pada tingkat internasional. Pada awalnya hanya ada satu organisasi saja, yaitu *International Federation of Trade Unions*—IFTU (Gabungan Internasional Serikat buruh). Sesudah Perang Dunia II kemudian menjadi dua organisasi. Yaitu *World Federation of Trade Unions*—WFTU (Gabungan Serikat buruh Sedunia-GSS) dan *International Confederation of Free Trade Unions*—ICFTU (Konfederasi Internasional Serikat buruh Bebas). Sejak semula, GSS mempunyai keanggotaan organisasi-organisasi serikat buruh dari negeri-negeri Sosialis dan non Sosialis. Pada umumnya organisasi-organisasi serikat buruh anggotanya dipimpin oleh kader-kader Sosialis dan Komunis, kendati Sekretaris Jenderal GSS yang dipilih pada kongres pertamanya, yaitu Louis Saillant, adalah non partai. Mula-mula kantor pusat GSS berkedudukan di Paris, lalu di Wina, dan akhirnya di Praha sampai sekarang. Kongres GSS yang ke 14 th. 2000 di New Delhi, India, dihadiri oleh delegasi dan peninjau dari 74 negeri di dunia yang mewakili 407 juta kaum buruh. ICFTU beranggotakan organisasi-organisasi serikat buruh yang kader-kader pimpinan pusatnya berhaluan tidak mau keluar dari lingkup hubungan produksi kapitalis. Sampai sekarang kedudukan kantor pusatnya adalah di Brussel.

SOBSI sebagai gabungan serikat buruh terbesar di Indonesia pra 1965, berafiliasi dengan GSS. Beberapa kader tinggi SOBSI ada yang pernah terpilih duduk di badan-badan tertinggi GSS. Yaitu di Biro Eksekutif sebagai Wakil Ketua, di Komite Eksekutif dan di Sekretariatnya. Demikian juga di salah satu badan tertinggi Serikat buruh Internasional selapangan kerja anggota GSS (TUI—*Trade Union Internationals*). Adapun ICFTU belakangan ini mengumumkan keanggotaannya sejumlah 188 organisasi serikat buruh nasional dari 134 negeri, yang mewakili 126 juta kaum buruh. Masih ada lagi organisasi internasional yang lebih kecil, yaitu *World Confederation of Labour*—WCL (Konfederasi Buruh

Sedunia). WCL ini semula lahir dari kalangan serikat-buruh yang berselar agama Kristen, tapi sekarang menyatakan dirinya sekular. Di samping yang internasional masih ada beberapa organisasi regional yang melingkupi Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Asia-Pasifik, baik berupa organisasi-organisasi serikat buruh independen maupun sebagai bagian dari ICFTU. Organisasi-organisasi serikat buruh internasional dan regional di atas tidak berperan menentukan terhadap gerakan serikat buruh tingkat nasional. Lebih banyak hanya menganjurkan kerjasama dan tukar-menukar informasi.

Serikat buruh pada dasarnya bukan partai politik. Untuk kepentingan langsung kaum buruh, serikat buruh sehari-harinya lebih banyak hanya menekuni kegiatan untuk perbaikan upah, jaminan sosial dan syarat-syarat kerja kaum buruh. Kendati demikian massa kaum buruh tidak bisa hanya bersikap masabodoh. Massa kaum buruh yang sedar akan kelasnya berkepentingan mengembangkan perjuangan mereka tidak hanya terbatas pada tingkat tuntutan dan aksi yang maksimal bisa ditangani oleh serikat buruh. Sebagai kelas buruh terpapar jang-kauan yang lebih jauh, yaitu membebaskan diri dari penghisapan kapitalis dalam perjuangan revolusioner di bawah pimpinan partai kelas buruh. Itulah hubungan berkait antara serikat buruh dan perjuangan revolusioner pembebasan kelas buruh. Maka serikat buruh politis tidak bisa sepenuhnya netral. Massa kaum buruh anggota tidak bisa dibebaskan sepenuhnya dari perjuangan politik yang berkarakter revolusioner.

Di Indonesia, terutama sejak era Soeharto, era yang disebut "Orde Baru," serikat buruh dinyatakan "harus lepas sama sekali dari kekuatan politik manapun. Kegiatannya harus dititikberatkan pada bidang sosial ekonomi." Demikian isi pokok penegasan *Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia* (MPBI) yang mengadakan seminar di Tugu Yogyakarta antara tg. 21-28 oktober 1971.[1] Selama era Soeharto sampai sekarang, dengan maksud menarik kaum buruh, golongan yang berkuasa di Indonesia memperlunak kata-kata *buruh* dengan sebutan *pekerja* atau lebih halusnya lagi *karyawan*. Meskipun kata-katanya diperlunak, kata-kata itu tidak lain hanya berfungsi sebagai pupur untuk menutupi penghisapan terhadap kaum buruh. Kendati serikat buruh sehari-harinya lebih

banyak hanya bergelimangan menangani kegiatan reform yang menjadi kepentingan langsung kaum buruh, Georgi Dimitrov di dalam tulisannya tentang "Tugas-Tugas Serikat buruh" antara lain menyatakan demikian:

> "Kenetralan serikat buruh adalah sepenuhnya pikiran burjuis. Dengan kedok kenetralan politik, burjuasi serta agen-agennya di dalam gerakan buruh (kaum Sosialis sayap kanan dan berbagai orang yang mengaku 'teman kaum buruh' serta kaum reformis sosial) berusaha memisahkan gerakan serikat buruh dari perjuangan proletariat dan serikat buruh dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis."[2]

Masa sekarang adalah masa *globalisasi.* Dalam rangka menemukan akalan baru untuk mempertahankan kapitalisme dan mencegah kebangkrutannya, kaum imperialis melancarkan globalisasi. Dengan globalisasi tidak berarti bahwa dominasi kaum imperialis di dunia ini semakin reda, terutama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, menghilangkan hambatan dagang, menghapus hambatan peredaran dan investasi modal sebagai pembuka jalan bagi globalisasi, bukan berarti yang berlaku liberalisme dalam artian kelasik. Yang berlaku adalah neo liberalisme. Antara kapitalis-kapitalis monopoli justru lebih ketat kaitannya dan lebih luas jaringannya. Kaum imperialis masa sekarang berkepentingan akan adanya kelonggaran yang lebih jauh jangkauannya, yang menjamin kebebasan modal-modal monopoli beroperasi di mana saja tanpa mengenal batas negeri. Praktek ekonomi Keynesianisme yang menjadi panutan umumnya partai-partai Sosial Demokrat di Barat, dan yang memberikan tekanan pada peran negara, lebih banyak telah terpuruk. Bisa dikatakan bahwa jiwa "Tangan Tak Berkasatmata Adam Smith" serta jiwa politik ekonomi "Konservatif" pemerintahan Ronald Reagan dan Margaret Tatcher, kini justru yang merayap lebih luas menjelajahi segala penjuru bumi. Di Eropa Barat, golongan-golongan kanan "Konservatif" menentang pemerintahan-pemerintahan Sosial Demokrat dan Aliansi Tengah Kiri. Mereka menghendaki aliansi penuh antara model Eropa Barat dan Amerika. Peran ekonomi berada di atas

[1] Lihat: Jurnal Volume 9. 1/Perkembangan Pekerja di Indonesia, hal. 3, Payaman J. Simanjuntak, Departemen Tenaga Kerja RI.

[2] Georgi Dimitrov, The Tasks of the Trade Unions, Transcription/HTML Markup: Mathias Bismo, kutipan penulis dengan huruf kursif, lihat pada hal. 8.

peran politik dan lebih berdampak menentukan terhadap kehidupan masyarakat. Privatisasi semakin merajalela dan dimanfaatkan untuk merusak kehidupan serikat buruh, terutama di sektor negara. Bagi negara-negara berindustri maju di Barat, tenaga-tenaga kerja pendatang dari luar diperlakukan sebagai tenaga buruh murah untuk mengisi kekosongan tempat kerja yang ditolak oleh tenaga kerja setempat, dengan main pukul rata tanpa mempedulikan kualitas pendidikan dan keahlian. Namun demikian, karena menjeleknya kehidupan ekonomi kapitalis, kaum kanan di Barat dari terutama golongan "Konservatif," kini banyak yang aktif berusaha membatasi lebih ketat masuknya orang-orang pendatang dari luar. Pemerintahan-pemerintahan nasional lebih banyak hanya berlayanan dengan kepentingan pasar. Modal-modal yang diinvestasikan ke luar, tidak dijatahkan untuk menciptakan pekerjaan, tapi untuk penyatuan dan keuntungan perusahaan yang justru banyak mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja. Ilmu dan teknologi yang semakin bebas dari politik dan etika, berada di bawah dominasi kebutuhan pasar dan keuntungan modal. Sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat dan keselamatan hidup bumi kita ini. Meskipun Jepang di Asia dan Pasifik merupakan operator terbesar di bidang investasi modal, yaitu 53%, di dunia masih tidak dapat mengungguli Amerika Serikat. Di samping itu Jepang lebih terbatas menangani barang-barang produksi industri manufaktur, sedang Amerikat Serikat barang-barang produksi yang lebih berkaliber, terutama yang melayani kebutuhan industri berat dan industri kepentingan peperangan. Mengenai investasi modal, Amerika Serikat menguasai dua pertiga dari seluruh investasi yang ada di dunia. Badan-badan internasional seperti World Bank, IMF dan WTO berada di bawah dominasi Amerika Serikat. World Bank dan IMF melalui tekanan-tekanan finansiil mampu mengemudi politik ekonomi negara-negara ekonomi lemah di Eropa Timur, Asia, Pasifik dan Amerika Latin, yang berarti merongrong juga kebebasan politik negara-negara itu. Dengan globalisasi, kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya bertambah membengkak. Kecemaran lingkungan hidup semakin menjadi-jadi.

Menghadapi imperialisme dengan globalisasinya, beban yang berada di pundak serikat buruh masa sekarang lebih berat. Apalagi gerakan kelas buruh masa sekarang yang berprinsip membebaskan

diri dari ikatan hubungan produksi kapitalis, baik nasional maupun internasional, sedang mengalami kemunduran. Karena globalisasi berkarakter internasional, gerakan serikat-buruh menghadapinya tidak juga semata-mata di dalam batas lingkungan nasional. Solidaritas antara serikat-serikat buruh dalam skala internasional melawan globalisasi, terutama yang menyangkut efek-efek negatif terhadap massa kaum buruh dan kehidupan serikat-buruh, adalah urgen. Namun, betapapun pentingnya perjuangan mengalahkan politik globalisasi kaum imperialis, perjuangan itu masih termasuk dalam kategori perjuangan reform. Hasilnya belum berarti sudah mengakhiri selain baru menggerowoti sistem kapitalisme.

Adapun dalam konteks umum nasional, bagi Indonesia yang pertama-tama paling urgen adalah memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan demokratis yang ada. Rakyat Indonesia memerlukan adanya pemerintahan demokratis yang berdiri mandiri, yang berpolitik ekonomi bebas memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sendiri ke arah penegakan industri nasional yang kuat. Itulah pemerintahan yang juga berkeharusan berani membebaskan diri dari cengkeraman perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan World Bank, IMF, WTO, blok-blok perdagangan seperti APEC dsb. Melihat syarat-syarat obyektif yang ada, keberhasilan menegakkan pemerintahan kategori di atas tidak bisa dibayangkan akan terjadi tanpa perjuangan yang sengit. Namun serikat buruh berkepentingan ikut berpartisipasi aktif dalam gerakan-gerakan yang mengarah ke pembentukan pemerintahan semacam itu.

Sebagai organisasi massa yang organisatoris seharusnya bukan bawahan (*onderbouw*) partai politik, serikat buruh berkepentingan mengorganisasi massa kaum buruh seluas-luasnya, tanpa membedakan faktor agama, jenis kelamin pandangan hidup, kategori etnik, nasionalitas dan aliran politik, berdasar atas prinsip-prinsip demokratis. SOBSI yang berdiri sejak 29 November 1946 berprinsip pada pola yang demikian. Beda dengan organisasi-organisasi lainnya yang mengaku mengorganisasi masa kaum buruh, yang dengan terang-terangan menyatakan bawahan partai politik. Beda pula dengan tuduhan rezim diktatur militer Soeharto dan anggapan penulis-penulis serta oknum-oknum Indonesia yang tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu tentang keadaan yang sebenarnya.

Di dalam kondisi sistem kapitalisme masih berlaku, serikat buruh memang bergerak dalam batas kegiatan reform. Namun kegiatan reform yang tidak hanya terbatas pada perbaikan syarat-syarat ekonomi dan sosial yang menjadi kepentingan langsung kaum buruh, tapi yang berfungsi juga sebagai stimulans pendidikan menanamkan kepedulian politik dan meningkatkan kesedaran kelas massa kaum buruh. Maka dari itu, serikat buruh di Indonesia berkeharusan juga membuka di depan mata kaum buruh serta rakyat banyak kejahatan-kejahatan Soeharto beserta rezim, keluarga dan penerus-penerusnya, baik politik maupun ekonomi, sampai pada menuntut hukuman setimpal bagi mereka. Di samping itu serikat buruh Indonesia tidak bisa terluput dari keharusan menuntut penghapusan "Dwi Fungsi TNI dan Polri" sampai pada pendemokratisasian kedua aparat negara itu. Keharusan lainnya adalah melawan penerapan globalisasi di segala bidang; melawan kenaikan harga; melawan tindakan-tindakan represif pemerintah seperti melarang pemogokan kaum buruh dan melakukan pelanggaran HAM semisal peristiwa Marsinah; menuntut dihapusnya undang-undang negara serta peraturan-peraturan pemerintah yang tidak demokratis, yang anti kaum buruh dan anti rakyat; mengekspos dan menuntut pembersihan lingkungan hidup, terutama di tempat-tempat kerja, begitu juga masalah-masalah lain yang bisa ditentukan berdasarkan situasi serta kondisi obyektif yang berlaku. Sebagai organisasi yang menghimpun massa kaum buruh, serikat buruh melalui prosedur demokratis perlu diisi dengan kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berwatak kelas buruh, yang berpandangan jauh ke depan, yang ulet, tekun, serta pandai mengorganisasi, mendidik dan memobilisasi massa kaum buruh dari memanfaatkan hasil-hasil tuntutan dan aksi serikat buruh. Itulah kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang konsisten berintegrasi dengan Partai Kelas Buruh serta melaksanakan politiknya, yang di Indonesia berkepentingan meneruskan perjuangan kemerdekaan nasional ke arah penegakan demokrasi sejati dan Sosialisme.

Melihat syarat-syarat obyektif yang ada, perjalanan menuju Sosialisme masih memerlukan waktu yang panjang. Lenin telah mengatakan, bahwa

"Kita bisa (dan harus) memulai membangun Sosialisme, tidak

dengan imajinasi material manusia, tidak dengan material manusia yang khusus disediakan untuk kita, tapi dengan material manusia yang diwariskan kepada kita oleh kapitalisme."[3]

Dalam kondisi masyarakat Indonesia masih belum bebas dari hubungan produksi kapitalis, adalah penting adanya sebuah persatuan nasional yang ditegakkan di atas dasar-dasar demokratis. Kekuatan tulang punggungnya adalah kelas buruh yang berada di bawah pimpinan partai kelas buruh dan yang bersatu dengan kaum tani. Tuantanah-tuantanah feodal, kaum kapitalis birokrat dan monopoli yang beragama, bisa termasuk ke dalam golongan beragama. Tidak berarti anti agama, namun karena pada dasarnya mereka itu tergolong ke dalam kategori kelas-kelas sosial yang tidak demokratis dan tidak anti imperialis, mereka tidak terhitung ke dalam persatuan nasional. Persatuan nasional tidak menolak partisipasi kelas-kelas sosial yang beragama di luar kategori tuantanah-tuantanah feodal, kaum kapitalis birokrat dan monopoli. Pemisahan antara kaum Nasionalis dan kaum Komunis hanya memberikan kesan bahwa kaum Komunis bukan patriot-patriot yang aktif berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Maka sebagai prinsip, komposisi persatuan nasional setepatnya tidak didasarkan atas penggolongan agama dan aliran politik, tapi terdiri dari kategori kelas-kelas sosial yang demokratis dan anti imperialis. Persatuan nasional tidak menutup partisipasi burjuasi non birokrat dan non monopoli, burjuasi sedang dan kecil, serta kaum inteligensia, tanpa membedakan kelainan agama, etnik, pandangan hidup dan aliran politik. Namun di dalamnya, kelas buruh di bawah pimpinan partai kelas buruh politis sepenuhnya mempunyai kebebasan.

Jika negara Indonesia benar-benar merupakan negara demokratis yang berdiri mandiri, yang bersandar pada kekuatan persatuan nasional di atas adalah ideal, meskipun sifatnya preliminer, sedang untuk mewujud-kannya pun memerlukan perjuangan sengit dalam kemungkinan waktu panjang. Tanpa mutlak di rintis oleh Indonesia, adanya banyak negara demokratis yang juga berdiri mandiri, yang bersandar pada kekuatan persatuan nasional dengan pola sama seperti di atas, yang bisa bergerak serempak dalam

[3] V.I. Lenin, *"Left-Wing" Communism, an Infantile Disorder*, hal. 40, Foreign Languages Press Peking 1975.

hubungan kerjasama dan saling-bantu, memungkinkan terciptanya syarat baru yang bisa diarahkan untuk mengakhiri politik globalisasi, di samping mengakhiri juga keunggulan politik, ekonomi dan militer imperialisme dengan imperialisme Amerika sebagai biang keladinya. Untuk sampai pada tercapainya syarat baru itu, berdasar atas nilai kenyataan yang ada dewasa ini, masih diperlukan perjuangan sengit dalam jangka waktu lama. Berapa lamanya masih belum bisa diperhitungkan dari sekarang. Namun tugas sejarah syarat baru itu selanjutnya adalah membangun Sosialisme dengan menciptakan kekuatan yang tak terpatahkan dalam membendung bangkit kembalinya kekuasaan burjuasi. Kejadian sejarah supaya tidak terulang kembali seperti runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Sosialis Eropa Timur, begitu juga restorasi kapitalisme yang beretiket mentereng "Sosialisme berkeperibadian Tiongkok."

Sesuai dengan bait yang diambilkan dari tulisan Lenin di atas, membangun Sosialisme tidak bisa dengan imajinasi material manusia, begitu pula dengan material manusia yang disediakan khusus untuk kita. Artinya tidak berkhayal dan tidak memaksakan diri jika syarat-syarat materiil dan kulturilnya memang belum cukup matang. Garis anti kapitalisme mutlak kaum Trotskyis dan Internasionale IV yang mereka katakan menuju Sosialisme, berarti garis khayalan. Meskipun sementara masih berada pada tahap belum sepenuhnya bebas dari hubungan produksi kapitalis, tidak mesti berarti berkapitulasi terhadap kapitalisme dan tidak mesti berarti pula tidak melakukan perjuangan mematangkan syarat-syarat materiil dan kulturil untuk membangun Sosialisme. Membangun Sosialisme tidak harus serempak di seluruh dunia dan tidak harus samasekali tidak bertahap seperti pola Revolusi Permanen a la Trotskyisme. Perkembangan kapitalisme di berbagai negeri sangat tidak sama. Negeri-negeri kapitalis berindustri maju sampai kini masih tampak berada sangat jauh dari situasi revolusioner. Negeri-negeri sedang berkembang yang kelas buruh dan partainya relatif masih lemah, belum menunjukkan adanya syarat-syarat materiil dan kulturil yang cukup matang untuk memasuki Sosialisme. Walaupun tidak terpaku pada keharusan memenangkan Sosialisme pada satu negeri, apa yang disimpulkan oleh Lenin tetap merupakan petunjuk yang bernilai obyektif dan tidak usang. Lenin mengatakan, bahwa

> "Sosialisme tidak dapat dimenangkan serempak pada *semua* negeri. Pertama-tama Sosialisme bisa dimenangkan pada satu atau beberapa negeri, sedang negeri-negeri lainnya untuk waktu tertentu masih tetap kapitalis atau pra kapitalis."[4]

Secara pokok bisa dikatakan, bahwa Sosialisme yang dimaksudkan bukan Sosialisme Feodal, bukan Sosialisme Burjuis atau bukan Sosialisme Burjuis Kecil. Bukan Sosialisme Impian (Utopi) a la Charles Fourier, Saint-Simon dan Robert Owen. Bukan Sosialisme melalui jalan damai mutlak, selama yang berlaku seperti kenyataan yang ada sampai sekarang, bahwa kelas kapitalis dan pra kapitalis penguasa negara yang dihadapi, tidak bersedia menyerahkan kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan senjata. Bukan Sosialisme semu, bukan Sosialisme dalam tulisan dan ucapan, yang tidak samasekali melepaskan diri dari hubungan produksi kapitalis, yang tidak mengubah secara mendasar sistem masyarakat kapitalis yang di dalamnya masih ada kelas penindas sebagai pemegang kekuasaan negara dan kelas tertindas yang tidak berkuasa. Dengan Sosialisme yang dimaksudkan adalah Sosialisme ilmiah yang sudah mengenyahkan dominasi kapitalisme. Yaitu Sosialisme yang kekuasaan negaranya melandaskan syarat-syarat materiil dan kulturil ke arah terwujudnya masyarakat di mana penindasan antar manusia sudah dikubur dalam sejarah. Demikianlah pentingnya serikat buruh melalui prosedur demokratis terisi dengan kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berhaluan revolusioner. Adalah tugas mulia kader-kader dan pemimpin-pemimpin revolusioner di dalam gerakan serikat buruh untuk mendidik massa kaum buruh menyedari diri akan posisi kelasnya dan berdasarkan keyakinan diri terjun dalam perjuangan menegakkan Sosialisme di bawah pimpinan partai kelas buruh.

2. Gambaran umum tentang gerakan serikat buruh beberapa negeri

Di antara tulisan-tulisan mengenai serikat buruh, pada th. 1894 ada yang ditulis oleh dua orang penulis terkenal bersama-sama, yaitu suami-isteri Sidney dan Beatrice Webb dari Inggris. Suami-isteri Webb adalah tokoh-tokoh terkemuka Inggris di bidang

[4] W.I. Lenin: "Das Militärprogramm der proletarischen Revolution." Karya Lenin dalam bahasa Jerman, Jilid 23, hal. 74. Diambil dari *Politische Ökonomie des KAPITALISMUS*, Lehrbuch, Dietz Verlag Berlin 1980.

ekonomi, sejarah dan reformasi sosial. Mereka tergolong tokoh-tokoh pimpinan dalam gerakan Sosialis Fabian Inggris di antara tokoh-tokoh lainnya seperti reformis sosial dan theosof Annie Besant, dramatis George Bernard Shaw, bekas perdana menteri James Ramsay MacDonald dan penulis novel H.G. Wells. Gerakan Sosialis Fabian Inggris mempunyai kegiatan mengorganisasi pendidikan Sosialis yang bertemakan perubahan sosial melalui reform-reform demokratis. Gerakan itu dirintis oleh grup intelektual golongan tengah yang menolak teori Marxisme tentang perjuangan kelas dan menginginkan persamaan bagi semua melalui pemilikan kolektif dan kontrol demokratis sumber-sumber kekayaan nasional. Yang aktif berpartisipasi dalam gerakan adalah orang-orang yang menghendaki perubahan-perubahan sosial secara damai dan berangsur. Idola gerakan adalah seorang jendral Romawi bernama Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator, yang berprinsip "mengalahkan musuh yang kuat dengan taktik lambat-lambatan dan menghindari pertarungan sebagai penentu." Gerakan Sosialis Fabian tidak membangun diri menjadi partai politik. Namun pengikut-pengikutnya berpartisipasi dalam pembentukan Komite Perwakilan Buruh yang kemudian menjadi Partai Buruh, dan selanjutnya mempunyai hubungan erat dengan partai itu. Adapun Sidney Webb pernah diangkat menjadi menteri urusan jajahan di dalam kabinet buruh, di samping mewakili Partai Buruh di dalam *House of Lords* (Majelis Tinggi). Kemenangan Revolusi Oktober Sosialis Russia ternyata memberikan daya tarik kepada suami-isteri Webb. Sebagai ungkapan simpati terhadap sistem Soviet, suami-isteri Webb menulis bersama yang berjudul *Jatuhnya Peradaban Kapitalis* (tahun 1923), dan *Communisme Soviet*: *Suatu Peradaban Baru* (tahun 1935 dalam dua jilid).

Di dalam sejarah, Inggris terkenal sebagai induk kapitalisme modern yang berkembang menjadi imperialisme, meskipun kini peran imperialisme dunia yang dominan telah bergeser dan berada di tangan Amerika. London pernah menjadi pusat teleng perjuangan revolusioner proletariat internasional. Persatuan Rakyat Pekerja (*Working Mens' Association*) yang menjadi panjatan bagi terbentuknya Internasionale Pertama di bawah pimpinan Marx dan Engels, mengambil tempat juga di London. Namun, kesemarakan Inggris sebagai pusat teleng perjuangan revolusioner kelas buruh sudah lama menjadi sejarah. Gerakan serikat buruh

adalah yang hidup menonjol selanjutnya dengan mengambil manfaat dari hasil produksi dan keuntungan pada saat kapitalisme sedang berada pada awal perkembangannya. Adapun gerakan serikat buruh di Inggris muncul lebih dulu sebelum adanya gerakan politik yang mengatas namakan buruh. British TUC (*British Trade Union Congress*—Gabungan Serikat buruh Britania) sudah resmi dibentuk pada tahun 1864 dan merupakan panjatan bagi dibentuknya Partai Buruh (*Labour Party*) pada tahun 1906. Pada mula pembentukannya, British TUC sebagai gabungan serikat buruh menampung keanggotaan serikat buruh yang hanya merangkumi lapisan buruh atasan atau aristokrat. Dari mula berdirinya, British TUC sudah dikenal sebagai aparat organisasi kaum birokrat, jaringan korupsi kaum manipulator dan sarang elemen-elemen yang memusuhi kelas buruh. Baru sejak tahun 1880, British TUC membuka keanggotaan yang meliputi lapisan kaum buruh lebih luas. Jika kemenangan Revolusi Sosialis Russia telah memberikan daya tarik kepada suami-isteri Webb, tidak demikian halnya dengan umumnya pemimpin-pemimpin gerakan serikat buruh Inggris. Pemimpin-pemimpin itu tidak melihat berkaitnya kondisi kaum buruh di dalam produksi dengan politik kaum kapitalis, dengan politik serta keorganisasian negara kapitalis, yang memanifestasikan penghisapan dan penindasan terhadap kaum buruh. Pikiran mereka terkurung oleh kungkungan sempit profesi. Partisipasi aktif di dalam perjuangan politik yang mengarah ke perubahan revolusioner masyarakat, mereka hindari. Yang mereka tangani hanya masalah-masalah yang menyangkut kepentingan langsung kaum buruh dalam artian sempit. Burjuasi besar Inggris yang pernah menguasai tanah-tanah jajahan yang terluas dan terkaya di dunia, berpotensi cukup besar untuk memberikan manfaat materiil kepada kaum buruh dan serikat buruh. Dari dasar materiil inilah tumbuhnya *lapisan buruh Aristokrat*, terutama di kalangan kaum buruh yang mempunyai keahlian. Dari dasar inilah pula muncul birokrat-birokrat yang menduduki pimpinan serikat-buruh sebagai *predikan gospel kompromi antara kaum buruh dan kaum kapitalis*. Maka kaum kapitalis berkesempatan menanamkan ilusi dengan berdalih, bahwa perbaikan syarat-syarat hidup kaum buruh tidak perlu dicapai dengan sarana pemogokan dan perjuangan melawan penghisapan kapitalis. Cukup dengan hanya mengembangkan kapital melalui

peluasan produksi serta keuntungan kapitalis yang berkesinambungan. Gerakan umum serikat buruh Inggris dan negeri-negeri kapitalis di Barat memang tidak terisi dengan kader-kader serta pemimpin-pemimpin yang berhaluan revolusioner. Meskipun formal menangani pembelaan terhadap kepentingan langsung kaum buruh, praktis serikat buruh merupakan aparat birokrasi, pembina keseimbangan dan perdamaian di dalam produksi kapitalis. Serikat buruh dimanfaatkan sebagai alat kaum kapitalis untuk menundukkan dan mengikat massa kaum buruh. Massa kaum buruh dijauhkan dari perjalanan perjuangan kelas untuk membebaskan diri dari penghisapan kapitalis. Maka tidak kebetulan jika seorang Eduard Bernstein yang revisionis dalam menutupi pengabdiannya terhadap burjuasi berdalih, bahwa:

> ‘sukses gerakan serikat buruh Inggris adalah berkat perjuangan ekonominya. Tindakan politik gerakan revolusioner dikatakan bukan faktor penentu bagi kemajuan kelas buruh dan bagi peralihan berangsur masyarakat di sepanjang garis Sosialis.’

Apa yang dikatakan oleh Bernstein tadi bernafas sama dengan pikiran para penganut *Guild Sosialism* di Inggris. Arti harfiah *guild* adalah gilde dalam bahasa Belanda, yaitu serikat kaum pengrajin pada abad pertengahan. Pada abad ke 20, yang dimasukkan ke dalam kategori *guild* tidak sama seperti pada abad pertengahan. Termasuk ke dalam kategori guild abad ke 20 menurut para penganut *Guild Socialism* adalah semua kaum buruh, kaum teknisi, pegawai kantor, bahkan juga majikan, asal mereka terhimpun di dalam kesatuan industri dan perdagangan. Kesatuan itu berstatus otonomi. Pimpinannya secara demokratis dipilih dan kinerjanya berada di bawah pengawasan kaum buruh. Para penganut *Guild Sosialism* berpikiran, bahwa perubahan dari kapitalisme ke Sosialisme pada dasarnya adalah ekonomis, bukan politis. Pikiran mereka bernada anarko sindikalisme. Mereka berpendirian, bahwa melalui kegiatan serikat buruh, kaum buruh secara berangsur mengambil alih administrasi perusahaan dan pemilik perusahaan swasta harus disingkirkan. Pemimpin terkemuka gerakan *Guild Sosialism* adalah George Douglas Howard Cole. Namun gerakannya tidak berumur panjang. Pada tahun 1930 sudah berhenti bereksistensi, terutama dengan berkembangnya keanggotaan dan pengaruh Partai Buruh Inggris.

Sampai sekarang Inggris masih berada jauh dari situasi revolusioner. Partai Komunis di sana terhitung partai kecil meskipun masih berpartisipasi di dalam pemilihan umum untuk parlemen. Sesudah Perang Dunia II, masih ada dua orang komunis yang duduk di parlemen. Sejak tahun 1950 Partai Komunis kehilangan mandat dan di parlemen tidak ada lagi wakilnya. Serikat-serikat buruh di sana pada umumnya tergabung dalam British TUC. Gerakan serikat buruh Inggris pada umumnya tidak ada kaitannya dengan perjuangan revolusioner membangun Sosialisme. Umumnya kader-kader dan pemimpin-pemimpinnya tidak saja tidak mau, tapi justru menentang mendidik serta membimbing massa kaum buruh ke perjuangan revolusioner. 'Reformisme' adalah haluan umum kader-kader dan pemimpin-pemimpin serikat buruh Inggris.

Di Amerika Serikat gerakan serikat buruh mempunyai aspek-aspek keunikannya sendiri. Bedanya dengan di Eropa Barat, gerakan serikat buruh di sana mengalami gelombang pasang dan surut yang lebih dahsyat. Pemerintah Amerika Serikat lebih kasar dalam tindakan-tindakan represif berupa larangan dan pembatasan fasilitas bagi serikat buruh dengan memanfaatkan undang-undang hasil rekayasa seperti *Taft-Hartley Act* th. 1947, *Smith Act* th. 1940 dan *McCarran Internal Security Act* th. 1950. Banyak agen-agen reaksioner yang diselundupkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk merongrong gerakan serikat buruh. Tidak sedikit juga jumlah pemimpin-pemimpin dan oknum-oknum tertentu di dalam serikat buruh yang terlibat dalam praktek kegiatan bisnis gelap, yang terkenal sebagai *kaum racketeer*. Anti Komunisme dan diskriminasi ethnik cukup kuat di kalangan gerakan serikat buruh Amerika Serikat. AFL-CIO sebagai gabungan serikat buruh mendepak keluar dari keanggotaannya, serikat-serikat buruh yang di anggap dipimpin oleh orang-orang komunis. Kaum buruh kulit hitam ditolak menjadi anggota penuh serikat buruh, sehingga upah mereka tertekan. Pimpinan AFL-CIO yang terdiri dari birokrat-birokrat yang berperangai Aristokrasi buruh, menguasai rekening bank yang bernilai jutaan dollar AS. Dari rekening bank itu dihambur-hamburkan jutaan dollar AS untuk menarik dengan tujuan membikin melempem aktivis-aktivis politik dan serikat buruh negeri-negeri lain, termasuk Indonesia. Serikat buruh yang berfungsi sebagai aparat birokrasi, di dalamnya tidak ada kehidupan demokratis. Massa kaum buruh anggota berada jauh dari kebebasan

berpartisipasi aktif dan berinisiatif dalam kehidupan serikat buruh. Secara umum tampak, bahwa *Demokrasi burjuis Amerika Serikat yang berhakekat Diktatur burjuis, lebih transparans ketimbang Eropa Barat*.

Dengan mengambil manfaat dari kelemahan gerakan serikat buruh di Amerika Serikat, banyak majikan kapitalis yang bertindak mencegah terorganisasinya kaum buruh dalam serikat buruh. Di antara tindakan majikan-majikan kapitalis adalah menghapus Perjanjian Kerja Kolektif yang ada dan menolak pembaruannya. Kaum buruh dipaksa menandatangani apa yang disebut dengan *Perjanjian Anjing Kuning*. Dengan perjanjian itu kaum buruh diikat untuk tidak bergabung dalam serikat buruh dan dipaksa memasuki organisasi yang dikontrol oleh majikan. Praktek-praktek paternalistis di "*fait accompli*"kan kepada kaum buruh seperti penyelenggaraan projek-projek kesehatan dan "kesejahteraan" dalam rangka menggiring kaum buruh supaya menghilangkan kepercayaan kepada serikat buruh.

Ada juga gerakan serikat buruh yang mengambil bentuk politik. Di samping misalnya menentang perundang-undangan yang merugikan bagi kepentingan langsung kaum buruh dan pembatasan otoritas serikat buruh, serikat buruh juga mengambil bagian aktif dalam pemilihan presiden. Misalnya ikut aktif dalam kampanye pemilihan presiden th. 1948 menyokong partai Demokrat dan calon presidennya Harry S. Truman. Pada tahun itu CIO (*Congress of IndAustrial Organisations*) masih berdiri sendiri, belum berfusi dengan AFL (*American Federation of Labor*—ejaan bahasa Amerika). Mayoritas anggota CIO, sekitar 5 juta orang, tidak saja menyokong program domestik calon presiden Truman, tapi juga program luar negerinya yang berisi aspek-aspek anti apa yang disebut Komunisme Internasional. Sedang minoritas anggota CIO, sekitar 1 juta orang, mengutuk politik luar negeri Truman sebagai manifestasi politik imperialisme Amerika Serikat dan menyokong calon presiden dari partai Progresif, Henry A. Wallace. Akibatnya, pimpinan CIO melalui rekayasa, di dalam konvensi th. 1949 mendepak keluar dari CIO, serikat-buruh-serikat buruh anggota yang paling kuat, yang berkeanggotaan sekitar 450.000 orang, dengan tuduhan didominasi oleh orang-orang Komunis. Itulah serikat-buruh-serikat buruh Listrik, Radio

dan Mesin. Beberapa bulan kemudian sepuluh serikat buruh lainnya didepak keluar juga dengan tuduhan serupa.

Dalam bulan Desember 1955 AFL dan CIO berfusi menjadi satu dengan nama AFL-CIO. Masalah utama yang dihadapi AFL-CIO sesudah berfusi adalah memberantas kegiatan kaum *racketeer*. Pada saat itu tampak sekali merajalelanya korupsi di kalangan sejumlah besar pemimpin serikat buruh dan di dalam kehidupan serikat buruh terdapat jaringan luas kegiatan bisnis gelap. Kepercayaan massa luas kaum buruh dan rakyat banyak terhadap peran serikat buruh menjadi menipis. Sampai sekarang banyak orang yang beranggapan, bahwa eksistensi serikat-serikat buruh di Amerika Serikat hanya lebih menunjukkan sifat reklamis saja. Selain yang bersangkutan langsung dengan kepentingan hidup pribadi, anggota-anggota serikat buruh pada umumnya tidak peduli kepada kepentingan-kepentingan di luarnya, terutama yang bersangkutan dengan masalah politik.

Mengenai pemberantasan kegiatan kaum racketeer oleh Senat Amerika Serikat telah dibentuk Komite Urusan Praktek Perburuhan dan Manajemen yang bertugas mendeteksi kegiatan kaum *racketeer* di kalangan kaum buruh. Komite itu telah menemukan bukti tentang jaringan korupsi yang luas, terutama di kalangan Organisasi Buruh Pengemudi Kendaraan Angkutan (*teamsters*) yang kuat. Dari hasil pendeteksian itu Organisasi Buruh Pengemudi Kendaraan Angkutan dikeluarkan dari keanggotaan AFL-CIO. Meskipun berbagai tindakan yang berbentuk deteksi dan isolasi dilakukan, kegiatan bisnis gelap di Amerika Serikat tidak bisa terbendung. Yang menjadi sumber pokoknya adalah adanya aspek unik sebagai dampak sistem kapitalisme Amerika Serikat. Yaitu aspek yang berupa kuatnya pikiran liberal orang banyak, bahwa di Amerika Serikat setiap orang bisa kaya dengan jalan apa saja, baik melalui jalan hukum maupun di luar hukum.

Di Amerika Serikat tidak banyak menonjol adanya buku tentang gerakan serikat buruh yang ditulis oleh orang yang berpikiran maju. Sungguhpun demikian, ada sebuah buku terkenal yang ditulis oleh William Z. Foster, yaitu tentang *Sejarah Gerakan Serikat buruh Internasional*. Di antara tulisan-tulisannya, William Z. Foster menulis juga mengenai *Sejarah Partai Komunis Amerika Serikat*.

Pada tahun 1945 ia dipilih menjadi Ketua Partai Komunis Amerika Serikat. Ia menggantikan Earl Browder yang terlibat dalam "penyelewengan kanan." Baik Foster maupun Browder, keduanya lebih banyak mempunyai latar belakang sebagai sindikalis. Maka keduanya menaruh minat terhadap gerakan serikat buruh. Namun gerakan serikat buruh yang berada di bawah pimpinan kader-kader komunis mengalami kegoncangan-kegoncangan yang drastis, terutama pada saat surut. Yang terutama menjadi penyebab adalah gagalnya aksi-aksi tertentu; tindakan-tindakan represif pemerintah dengan perundang-undangan hasil rekayasa; pendepakan serikat-serikat buruh yang dipimpin oleh kader-kader dan pemimpin-pemimpin komunis keluar dari keanggotaan AFL-CIO sebagai organisasi induk; demikian juga perpecahan di kalangan pimpinan Partai Komunis serta tersiarnya berita tentang adanya anggota-anggota Partai Komunis yang menjadi mata-mata Soviet sebelum dan selama perang dingin.

Pada diri Foster akhirnya tampak adanya kejenuan terhadap perjuangan revolusioner, yang dampaknya menjiwai akhir tulisannya tentang Sosialisme. Di dalam tulisannya itu ia cetuskan idenya tentang Sosialisme dengan jalan damai. Yaitu ide serupa seperti yang dilontarkan oleh Chrustjov dalam Kongres ke 20 PKUS, tapi yang oleh Foster dicetuskan lebih dulu sebelum Chrustjov mengutarakannya. Ide Chrustjov adalah manifestasi revisionisme modern yang secara populer berpicu kepada apa yang disebut "De-Stalinisasi." "De-Stalinisasi" Chrustjov merupakan titik tolak merestorasi kapitalisme. Secara fundamental pandangan teori Stalin tidak melanggar prinsip-prinsip umum Marxisme-Leninisme. Pandangan teori Stalin yang revolusioner dan justru bertentangan dengan pandangan teori Chrustjov yang revisionis, tidak dapat dicampur adukkan begitu saja sebagai aspek-aspek kesamaan, seperti yang kini banyak dilontarkan oleh kaum Trotskyis dan Internasionale IV.

Pada tahun 1966 Partai Komunis Amerika Serikat kembali dengan kegiatan-kegiatan terbukanya, dan sejak itu selalu aktif berpartisipasi dalam pencalonan pemilihan-pemilihan presiden. Namun partai pada waktu sekarang hanya merupakan kekuatan politik yang kecil. Pada akhir tahun delapan puluhan dari abad yang telah silam, Gus Hall sebagai orang pertama partai mengkritik

politik "reformasi" Gorbachov. Sesudah jatuhnya Uni Soviet, Gus Hall justru dikatakan telah menerima uang 2 juta dolar AS dari Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dengan pembuktian sebuah tilgram, yang oleh beberapa ilmuwan Amerika Serikat diragukan kebenarannya. Dampak perkembangan terakhir dari kehidupan politik Partai Komunis Amerika Serikat dan adanya pemimpin partai yang dipermasalahkan, menambah semakin menipisnya pengaruh kaum Komunis terhadap gerakan serikat buruh.

Meskipun aksi-aksi dan tuntutan-tuntutan serikat buruh di Amerika Serikat bisa menghasilkan perbaikan-perbaikan tertentu, terutama tentang upah, gerakan serikat buruh tetap menghadapi kesulitan-kesulitan yang serius. Serikat-serikat buruh secara keseluruhan hanya mewakili sekitar seperenam dari jumlah kaum buruh yang bekerja aktif. Pada era globalisasi, perusahaan-perusahaan banyak yang direlokasikan ke luar negeri. Lapangan kerja di pabrik-pabrik semakin sedikit. Sementara itu orang-orang muda dari kalangan kaum buruh banyak yang tidak menyukai serikat buruh. Pemerintahan Federal bersikap anti serikat buruh. Keadaan umum ekonomi tidak tampak membaik. Terutama di kalangan industri manufaktur terjadi penurunan upah dan pemotongan aspek-aspek kemanfaatan lainnya. Maka reformisme yang secara umum menjiwai haluan kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan serikat buruh Amerika Serikat, dewasa ini semakin tidak mudah menemukan keseimbangan dengan politik kaum modal dan pemerintah dalam rangka mempertahankan sistem kapitalisme.

Di atas adalah gambaran umum gerakan serikat buruh dari dua negeri kapitalis yang mempunyai gabungan serikat buruh terbesar di dunia. Reformisme memang yang umumnya menjiwai haluan kader-kader dan pemimpin-pemimin gerakan serikat buruh di Barat. Di Eropa Barat masih ada beberapa gabungan serikat buruh besar yang mempunyai tradisi lama. Di antaranya adalah CGT (*Confédération Générale du Travail*) di Perancis, CGIL (*Confederazione Generale Italiana del Lavoro*) di Italia dan DGB (*Deutscher Gewerk-schaftsbund*) di Jerman.

CGT yang berdiri sejak th. 1895, selama Perang Dunia II mempunyai reputasi baik karena kader-kader pimpinannya

berpartisipasi aktif di dalam Front Persatuan Anti Fascis melawan pendudukan Jerman. Sampai sekarang CGT tetap merupakan gabungan serikat buruh terbesar di Perancis. Yang berdominasi dalam pimpinan CGT adalah kader-kader Komunis, yang sekarang ini berarti kader-kader Komunis "De-Stalinis." Sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada th. 1945, CGT termasuk pendiri GSS (Gabungan Serikat buruh Sedunia) bersama-sama dengan British TUC (Gabungan Serikat-buruh Inggris), CIO dari Amerika, Gabungan Serikat-buruh Uni Soviet, Gabungan Serikat buruh Tiongkok dan Gabungan Serikat buruh se-Amerika Latin. Di dalam kongres pertama GSS, yang terpilih sebagai ketuanya adalah Walter Citrine dari British TUC dan Louis Saillant dari CGT sebagai Sekretaris Jenderalnya. CGT kemu-dian mengalami perpecahan. Kader-kader pimpinannya yang meninggalkan CGT mendirikan organisasi baru dengan nama *Force Ouvrièr*. GSS pun mengalami perpecahan juga dan yang meninggalkan GSS mendirikan ICFTU. Pada tahun 1978 CGT keluar dari keanggotaan GSS dengan keterangan hanya untuk sementara waktu.Yang masih tergabung pada GSS adalah Serikat buruh Agraria anggota CGT melalui TUI. Sampai kini, penggabungan CGT sebagai gabungan serikat buruh pada organisasi internasional hanya berlingkup regional Eropa, yaitu pada ETUC atau CES dalam bahasa Perancis.

Sejak terjadinya perpecahan pada tahun 1949, CGT dengan Alain Le Leap sebagai pemimpin utama, menyerukan pentingnya digalang aksi-aksi kesatuan di antara berbagai serikat buruh yang organisatoris tidak ada ikatannya satu sama lain. Seruan itu berkumandang sampai pada pimpinan GSS. Di dalam pimpinan GSS, kader-kader CGIL bersama-sama dengan kader-kader CGT banyak mengambil inisiatif dan aktif mempro-pagandakan aksi kesatuan di kalangan serikat buruh berbagai negeri di dunia. Seputar tahun 1950-an adalah saat santer-santernya seruan kesatuan aksi itu berkumandang. Dari sudut pandang *aksi reform* yang terbatas pada memenangkan tuntutan mengenai kepentingan langsung massa kaum buruh untuk perbaikan nasib, pada umumnya aksi kesatuan memang lebih efektif ketimbang aksi tunggal. Yaitu aksi yang berlangsung pada satu lingkup kesatuan industri, kesatuan administrasi pemerintahan, kesatuan regional administrasi negara, kesatuan wilayah nasional, kesatuan

lingkungan regional antar berbagai negeri, dan kesatuan internasional, di mana terdapat lebih dari satu serikat buruh dengan dukungan massa kaum buruh yang berkepentingan sama. Pengalaman praktek menunjuk-kan adanya kelemahan penting mengenai aksi kesatuan. Walaupun dengan aksi kesatuan bisa dihasilkan perbaikan tertentu, masa kaum buruh pada umumnya sulit untuk bisa membedakan, mana di antara berbagai serikat buruh yang ikut ambil bagian, yang paling militan dan paling dapat diandalkan membela kepentingan kaum buruh. Namun demikian, sebagai prinsip umum, meskipun di Perancis dan di negeri-negeri Barat kemungkinannya sangat kecil atau samasekali tertutup, bagi kader-kader dan pemimpin-pemimpin serikat buruh yang berhaluan revolusioner dimana saja mereka berada, adalah penting untuk memanfaatkan daya rangsang massa kaum buruh dari aksi-aksi yang berhasil. Daya rangsang itu berperan penting sebagai stimulans pendidikan mematangkan kesedaran kelas bagi massa kaum buruh ke perjuangan revolusioner. Adapun aksi-aksinya tidak mutlak aksi kesatuan, jika aksi tunggal cukup berperan positif dan menentukan bagi perbaikan nasib kaum buruh.

Seperti umumnya massa kaum buruh di Eropa Barat, termasuk juga di Perancis, mereka puas dengan hasil aksi-aksi yang nilainya relatif lebih tinggi ketimbang di negeri-negeri sedang berkembang, meskipun kadang-kadang harus ditempuh melalui pemogokan. Pemimpin-pemimpin serikat buruh yang memasang merek Komunis atau Sosialis pada diri mereka, termasuk yang pada umumnya puas juga dengan hasil-hasil yang terbatas pada aksi-aksi reform. Mereka berulah sebagai birokrat-birokrat yang hanya tenggelam dalam kelibatan menangani kegiatan-kegiatan tambal-sulam.

Pemogokan yang diangkat sebagai senjata terakhir gerakan. Kepedulian kader-kader dan pemimpin-pemimpin di dalam gerakan serikat buruh mendidik menyedarkan massa kaum buruh untuk perjuangan revolusioner tidak berkasatmata, sudah dilupakan atau dipandang tidak ada urgensinya lagi dan menjadi sejarah. Reformisme merupakan aspek umum, tidak saja mewarnai haluan politik kader-kader dan pemimpin-pemimpin CGT, tapi juga umumnya kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan

serikat buruh di Barat.

Gilbert Fournier, salah seorang pemimpin CFDT mengatakan, bahwa hanya 10% dari kaum buruh Perancis adalah anggota serikat buruh. Berarti merosot 20% ketimbang tahun 1970. Howard Machin, seorang analis politik Perancis pada Lembaga Eropa Sekolah Ekonomi di London mengatakan, bahwa pemogokan-pemogokan di Perancis membawakan aspek yang "paradoksal." Menurut dia, walaupun gerakan serikat-buruh di Perancis lebih lemah ketimbang di Jerman, dalam aksi-aksi massa, jutaan kaum buruh dapat dikerahkan. Fenomena ini menunjukkan, bahwa peran gerakan serikat buruh tidak cukup bisa diandalkan membela kepentingan massa kaum buruh.

CGT sebagai gabungan serikat buruh terbesar di Perancis, citra kesemarakannya sehabis Perang Dunia II sudah pudar. Pemerintahan Sosialis Keynesianis dengan Perdana Menteri Lionel Jospin yang berlatar belakang sebagai Trotskyis, kini telah jatuh. CGT yang ikut memberikan dukungan kepada pemerintahan ini kena getahnya juga. Jatuhnya pemerintahan Jospin bagi CGT adalah suatu pukulan yang berdampak negatif bagi reputasinya dalam gerakan serikat buruh. Meskipun demikian, reformisme yang menjiwai politik kader-kader dan pemimpin-pemimpin CGT, begitu juga gerakan buruh Perancis pada umumnya, bagaimanapun juga tidak bisa membendung tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan revolusioner. Pada taraf sekarang kekuatan-kekuatan itu yang memang ada, masih memerlukan waktu untuk bisa kiprah menjadi tangguh dan unggul.

Lain lagi dengan bentuk keunikan yang ada pada gerakan serikat buruh di Italia. Gabungan serikat buruh terbesar di Italia adalah CGIL. Begitu GSS dibangun, CGIL lalu bergabung menjadi anggotanya. Dengan munculnya ICFTU, CGIL bersama-sama dengan CGT merupakan pilar kekuatan GSS. Sesudah Walter Citrine meletakkan kedudukannya karena British TUC memisahkan diri, yang dipilih untuk menggantinya sebagai Ketua GSS adalah Giuseppe Di Vittorio, Sekretaris Jenderal CGIL. Di dalam Badan-Badan tertinggi dan di Sekretariat GSS, kader-kader CGIL dan CGT selalu menempati jumlah tempat yang sama. Di dalam Sekratariat GSS ada bentuk keunikannya lagi. Yaitu bahwa

bagi kader-kader CGIL, yang seorang adalah Komunis dan yang seorang lagi Sosialis. Bagi CGT, untuk mengimbangi CGIL, jumlah kadernya di dalam Sekretariat GSS juga dua orang. Bagi negeri-negeri lainnya yang ada kadernya yang terpilih duduk di dalam Sekretariat GSS, masing-masing hanya seorang, meskipun dilihat dari jumlah anggota ada yang lebih besar ketimbang CGIL dan CGT. Kombinasi Komunis-Sosialis mencerminkan komposisi pimpinan CGIL selama periode perang dingin.

Di Italia, terutama sesudah Perang Dunia II selesai dan selama masa perang dingin, pencerminan perbedaan pandangan politik antara kader-kader Komunis dan kader-kader Sosialis yang memimpin CGIL tidak tampak jelas. Kader-kader Komunis yang umumnya menangani gerakan serikat buruh, oleh kekuatan-kekuatan kiri di dalam Partai Komunis dikategorikan sebagai elemen-elemen moderat yang tidak mau meninggalkan aliansi dengan kader-kader Sosialis. Aliansi ini memang terjalin selama Perang Dunia II di dalam lingkup perjuangan anti fasis. Dengan aliansi Komunis moderat dan Sosialis, dampak pendidikan politik di kalangan massa kaum buruh, terutama pendidikan untuk perjuangan revolusioner, tidak transparans. Maka tidak mengherankan bahwa sesudah CGIL keluar dari GSS, penggabungannya dengan ICFTU terjadi dengan lancar, tanpa melalui kesulitan.

Organisasi serikat buruh yang bergabung dengan ICFTU di Italia masih ada dua lagi. Yaitu CISL (*Confederazione Italianá Sindicati del Lavoro*) dan UIL (*Unione Italianá del Lavoro*). CGIL dan dua organisasi serikat buruh itu bersama-sama menentang politik pemerintahan tengah-kanan Silvio Berlusconi yang secara unilateral mengubah undang-undang yang sifatnya melindungi pemecatan terhadap kaum buruh. Pada tanggal 16 April 2002 telah terjadi pemogokan umum yang diorganisasi oleh tiga organisasi serikat buruh tadi. Pemogokan umum melawan politik Berlusconi bisa sambung-menyambung terus seperti menyusulnya pemogokan umum 8 jam pada tanggal 18 Oktober 2002 yang diorganisir tersendiri oleh CGIL, tanpa bekerjasama dengan organisasi-organisasi serikat buruh lainnya. Namun terjadinya pemogokan-pemogokan itu adalah karena meluapnya kemarahan massa kaum buruh dan karena desakan keras elemen-elemen kiri, terutama di

kalangan CGIL di bawah. Di samping tiga organisasi serikat buruh di atas masih ada satu lagi, yaitu UGL (*Unione Generale del Lavoro*) yang otonom.

Dampak 56 kali perubahan pemerintahan sampai pada tahun 1999 dengan kembalinya Silvio Berlusconi sebagai pemimpin kanan di pentas kekuasaan, dan ditambah dengan dampak moderasi politik, pergantian nama dan perpecahan yang melanda Partai Komunis, oleh pemimpin-pemimpin kanan gerakan serikat buruh dimanfaatkan menjadi keharusan bagi serikat-serikat buruh melepaskan diri dari berasosiasi dengan partai politik apapun. Partai Komunis Italia (*Partito Comunista d'Italia*) pasca Perang Dunia II yang politiknya dimoderasikan, namanya diganti menjadi *Partito Democratico della Sinistra* (Partai Demokrasi Kiri, disingkat PDS). Partai ini meraih 16,6% suara dalam pemilihan dan mempunyai wakil-wakilnya di parlemen. Pecahannya bernama *Partito Rifondazione Comunista* (Partai Pembangunan Kembali Komunis) yang belakang-an mengalami perpecahan lagi dengan terbentuknya partai baru dengan memakai nama lama, yaitu *Partito Comunista d'Italia* (Partai Komunis Italia). Partai Pembangunan Kembali Komunis dalam pemilihan memperoleh 5% suara dan di parlemen ada wakil-wakilnya. Partai Komunis baru pecahannya karena hanya mendapatkan 4% suara tidak ada wakilnya di parlemen. Di samping itu ada *Sinistra Comunista* (Komunis Kiri) sebagai Partai Komunis Internasional yang mempunyai cabang-cabangnya di beberapa negeri di Eropa, yang menyatakan diri bukan partai Trotskyis, tapi tidak berpengaruh luas dan tidak mempunyai wakil di parlemen.

Adapun pemimpin-pemimpin kanan yang berhasil mengambil alih kepemimpinan serikat buruh semakin kelihatan belangnya sebagai birokrat-birokrat yang tidak peduli lagi terhadap prinsip-prinsip demokratis. Massa kaum buruh anggota dikebiri untuk bisa ikut aktif dan mengambil inisiatif dalam kehidupan serikat buruh. Kehidupan demokratis di dalam serikat buruh Italia menjadi beku. Kebekuan kehidupan demokratis di dalam serikat buruh memberikan manfaat kepada semakin intensifnya kolaborasi kelas antara pemimpin-pemimpin kanan serikat buruh di satu sisi dan majikan-majikan kapitalis beserta pemerintahan burjuis reaksioner di sisi lain. Di Italia masalah itu sudah semakin santer menjadi

persoalan di dalam gerakan serikat buruh. Perlunya radikalisasi haluan politik pemimpin-pemimpin CGIL sudah menjadi persoalan hangat. Kekuatan-kekuatan oposan kiri, terutama yang terdiri dari kaum *Komunis Kiri* (*Sinistra Comunista*), yang meskipun tidak muncul dalam kegiatan organisasi di luar CGIL, telah mengorganisasi diri di dalam COBAS (*Comitati di Base*—Komite Basis). Perspektif selanjutnya bergantung pada situasi dan kondisi obyektif yang mewarnai haluan politik kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan serikat buruh Italia. Bagi kader-kader dan pemimpin-pemimpin revolusioner, apa yang ditulis oleh Lenin di dalam *Komunisme 'Sayap Kiri,' Suatu Penyakit Kekanak-kanakan*, bagian yang berjudul *Apakah kaum revolusioner harus bekerja di dalam serikat buruh reaksioner?*, tetap bernilai aktuil. Sesuai dengan tulisan Lenin itu, menolak bekerja di dalam serikat buruh yang pemimpin-pemimpinnya anti kelas buruh tidaklah perlu. Penolakan itu berarti meninggalkan massa kaum buruh tetap berada di bawah kungkungan pengaruh pemimpin-pemimpin yang reaksioner. Tergesa-gesa membentuk organisasi baru di luarnya pun bukan suatu pemecahan selama bagian terbesar massa kaum buruh masih belum bersedia melepaskan diri dari pengaruh pemimpin-pemimpin yang anti kelas buruh. Yang penting adalah selalu berada di tengah-tengah massa, aktif dan konsisten menampilkan kegiatan-kegiatan membela kepentingan langsung massa, di samping tanpa mengenal lelah melakukan agitasi dan propaganda menarik massa supaya bebas dari pengaruh pemimpin-pemimpin yang anti kelas buruh. Dalam hubungan itu tugas serikat buruh memang tidak gampang. Sebab selama yang ditangani adalah kegiatan reform di dalam lingkup hubungan produksi kapitalis, majikan kapitalis dan pemerintahan burjuis reaksioner mempunyai syarat materiil untuk bisa menipu massa kaum buruh dengan berbagai rekayasa. Dengan dukungan massa kaum buruh, adalah tugas kader-kader revolusioner di dalam gerakan serikat buruh untuk tanpa ragu-ragu berani dengan tegas mengekspos segala tipu-muslihat yang direkayasakan tadi. Di Italia, hubungan pat-pat gulipat pemimpin-pemimpin kanan serikat buruh dengan majikan-majikan kapitalis dan pemerintahan burjuis reaksioner, sudah tidak terkontrol langsung lagi oleh massa kaum buruh karena bekunya kehidupan demokratis di dalam serikat buruh. Membuka kehidupan demokratis dan mengekspos kepalsuan pemimpin-pemimpin yang

anti kelas buruh terletak di tangan kader-kader serta pemimpin-pemimpin revolusioner setempat dengan dukungan massa kaum buruh.

Beda dengan di Inggris, impulsi gerakan massa kaum buruh di Jerman tidak terungkap oleh kebangkitan gerakan serikat buruh, tapi oleh perlawanan sengit Partai Sosial Demokrat Jerman (*Sozialdemokratische Partei Deutschlands*—SPD) antara th. 1878-1890. SPD yang memimpin gerakan massa pada waktu itu berhasil mematahkan undang-undang anti Sosialis Bismarck. Pada era kekuasaan Bismark, SPD merupakan pendahulu Partai Komunis. Atas prakarsa SPD diorganisasi serikat-serikat buruh "bebas," yang berfungsi sebagai lahan persemaian gerakan Sosialis.

Pengorganisasian serikat-serikat buruh Jerman diawali dengan dibentuknya Komisi Umum Serikat buruh yang diketuai oleh Karl Legien. Pada Kongres Pertama Serikat buruh di Halberstadt th. 1892 dilandaskan prinsip pengorganisasian sentral selapangan kerja, bukan semata-mata lokal, dan penerimaan keanggotaan wanita dengan hak suara sama dengan laki-laki.

Sejak tahun 1890 gerakan serikat buruh yang disponsori oleh SPD mulai berkembang. Namun, dengan perkembangan gerakan serikat buruh, perubahan hubungan baru antara kekuatan-kekuatan yang ada, menciptakan kontradiksi yang semakin tajam antara SPD dan serikat buruh. Meskipun pandangan teori revisionis Bernstein mula-mula tidak mendapatkan tanggapan di kalangan pemimpin-pemimpin serikat buruh, di kalangan luas di dalam SPD terlihat adanya bahaya terbawanya gerakan Sosialis Jerman mengikuti garis Inggris. Yaitu reformisme gerakan serikat buruh menggantikan garis revolusioner politik partai sebagai jiwa gerakan buruh. Adalah Rosa Luxemburg yang memimpin perlawanan terhadap pandangan teori Bernstein. Semboyan Luxemburg yang terkenal dalam hubungan ini adalah *Reform atau Revolusi*. Menurut Bernstein, 'gerakan serikat buruh yang dengan efektif melawan mekanisme penghisapan kapitalis, secara berangsur justru berkembang menuju sosialisasi masyarakat.' Rosa Luxemburg membantah dengan keras, bahwa pikiran ini sama sekali tidak benar.

> 'Gerakan serikat buruh tidak mengarah ke penghapusan penindasan kelas. Kegiatannya justru untuk mendapatkan jaminan, bahwa di

> dalam kerangka struktur kapitalisme yang berpenghisapan (eksploitatif), kaum buruh menerima upah sebagai imbalan yang menurut pasar paling baik bisa diberikan. Masyarakat kapitalis tidak bergerak menuju suatu epoka yang ditandai dengan perkembangan gerakan serikat buruh yang menghasilkan kemenangan, tapi justru menuju suatu periode di mana kepahitgetiran yang melanda gerakan serikat buruh semakin meningkat. Maka betapapun juga hasil-hasil temporer bisa dicapai oleh gerakan serikat buruh, hasil-hasil itu tetap tidak berada di luar batas yang berakar pada sistem kapitalisme.'

Kendati demikian Rosa Luxemburg "*tidak mengingkari, bahwa gerakan serikat buruh yang berada di bawah pimpinan kaum Sosialis dapat memberikan sumbangan penting terhadap gerakan revolusioner*." Demikian tadi esensi pikiran Rosa Luxemburg sebagai bantahan terhadap pikiran Bernstein.

Makin lama makin jelas bahwa kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan serikat buruh Jerman lebih terkena oleh pengaruh kemenangan kegiatan-kegiatan profesional yang berlingkup sempit, ketimbang oleh pengaruh politik gerakan Sosialis yang berkarakter revolusioner. Membanjirnya anggota-anggota baru serikat buruh mendorong semakin menipisnya pengaruh SPD dan dukungan massa kaum buruh terhadapnya. Pemimpin-pemimpin serikat buruh semakin banyak yang merasa jenu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh SPD. Menurut mereka, dominasi SPD menjadi kendala terhadap usaha menarik keanggotaan massa kaum buruh yang tidak ada minat atau yang menentang politik kaum Sosialis. Di antara pemimpin-pemimpin yang paling terkemuka adalah Otto Hué. Menurut dia, serikat buruh hanya bisa memenuhi 'kepentingan profesional, bukan kepentingan kelas', jika posisi yang diambil adalah 'kenetralan politik'. Antara th. 1900 dan 1905, ketegangan semakin memuncak antara SPD dan gerakan serikat buruh. Akhirnya pada th. 1906, karena desakan kuat dari pemimpin-pemimpin serikat buruh, SPD di dalam Konvensi Mannheim mengakui 'kemandirian (independen) dan otonomi' serikat buruh. Pengakuan ini adalah kemenangan bagi pemimpin-pemimpin kanan di dalam gerakan serikat buruh Jerman, yang sampai sekarang formal masih tetap berlaku. Pengakuan ini yang menempatkan gerakan serikat buruh Jerman dalam posisi politis netral, tidak berarti lain kecuali serikat buruh dipertahankan sebagai aparat kekuasaan burjuasi,

dan kelas buruh dikebiri dari perjuangan revolusioner.

Sesudah ambruknya imperium Jerman dan pemerintahan parlementer ditegakkan pada oktober 1918, ada nuansa-nuansa baru dalam kehidupan demokratis yang bisa dimanfaatkan oleh gerakan serikat buruh. Misalnya serikat buruh diterima sebagai partner perjanjian kolektif, dan 8 jam kerja sehari diakui. Komisi Umum serikat buruh direstrukturisasikan menjadi Konfederasi Umum Serikat buruh Jerman (*Allgemeiner Deutscher Gerwerkschaftsbund*—ADGB). Struktur organisasinya sama seperti DGB masa sekarang, yaitu berbentuk 'konfederasi' yang merangkumi kategori 'serikat-serikat buruh bebas,' bukan 'serikat-serikat buruh manunggal'. Program pendidikan yang berkarakter profesi diperluas. Unit-unit publikasi dan cetak-mencetak dibentuk. Serikat buruh mendirikan perusahaan-perusahaan milik sendiri, khususnya di bidang perbankan, bangunan, perumahan dan asuransi.[5]

ADGB yang selanjutnya sejak th. 1949 diteruskan dan mengambil nama DGB, finansiil cukup kuat. Kekuatan finansiil inilah yang justru membikin melempemnya kebanyakan pemimpin gerakan serikat buruh Jerman untuk perjuangan revolusioner. Sudah sejak masa hidup Rosa Luxemburg, pemimpin-pemimpin utama gerakan serikat buruh Jerman enggan menanggapi anjuran melancarkan pemogokan massal, terutama yang bersifat politik. Mereka terdiri dari birokrat-birokrat yang sudah terkena cekokan kapitalisme sebuah negeri yang berindustri maju dan berperangai 'Aristokrasi buruh.' Pemimpin-pemimpin itu khawatir, pemogokan memba-wa akibat kosongnya rekening bank serikat buruh. Di satu pihak, pemimpin-pemimpin itu mandul untuk memimpin aksi

[5] Sebagai catatan bisa ditambahkan, bahwa keadaan di Swedia menunjukkan, bagaimana sebuah perusahaan kapitalis yang modal pokoknya berasal dari pengumpulan uang iuran serikat buruh disebut koperasi. Di bidang konsumsi, para konsumen dipikat untuk membeli barang-barang pada toko milik perusahaan tadi menjadi pembeli tetap dengan sebutan anggota. Yang sudah menjadi anggota dengan sendirinya mendapatkan kartu tanda anggota. Melalui terkumpulnya kwitansi-kwitansi pembelian dalam jumlah tertentu, anggota bisa mendapatkan bonus berupa potongan harga atau jumlah nilai uang tertentu yang hanya bisa dimanfaatkan untuk membeli barang di toko tersebut. Di Swedia ada juga bank dan perusahaan asuransi yang modal pokoknya dari serikat buruh. Terutama perusahaan asuransi itu yang bisa mengumpulkan uang berunggun-unggun dengan jalan mudah.

yang finansiil berkonsekuensi berat. Di lain pihak, massa kaum buruh Jerman pun berada pada kondisi hidup yang relatif baik dan tidak tersentuh oleh kemiskinan. Dua aspek tadi adalah kendala besar, mengapa massa kaum buruh Jerman sukar ditarik untuk dididik dan dimobilisasi dalam perjuangan revolusioner. Dua aspek itu merupakan keumuman yang dewasa ini hidup di negeri-negeri kapitalis di Barat, terutama yang berindustri maju.

Ada situasi dan pengalaman di negeri lain di luar Jerman. Pada tahun 70-an, ada bagian penting dari isi laporan Lin Biao dalam Kongres ke 9 PKT (Partai Komunis Tiongkok) yang dikritik keras oleh sebuah grup politik kiri di Denmark. Di dalam laporan Lin Biao antara lain dinyatakan, bahwa di Eropa Barat ada perjuangan revolusioner. Apa yang dinyatakan oleh Lin Biao itu tidak sesuai dengan kenyataan obyektif yang berlaku. Sampai sekarang Eropa Barat jauh dari mengindikasikan adanya situasi revolusioner. Grup politik kiri tadi yang kini tidak terdengar lagi kegiatan positifnya yang menonjol, tidak berhasil menarik massa luas kaum buruh di negerinya yang termasuk Eropa Barat. Massa kaum buruh setempat pada umumnya tidak mempan untuk dididik memiliki kesedaran kelas dan mempunyai keyakinan akan pentingnya mengambil bagian dalam perjuangan revolusioner membangun Sosialisme. Pada umumnya mereka tidak merasa berkepentingan untuk hidup di bawah Sosialisme. Syarat-syarat hidup dan syarat-syarat kerja kaum buruh yang dinilai memerlukan perbaikan, dianggap tidak terlalu berat untuk diatasi, asal mau bekerja berat dan jika perlu aksi mogok ditempuh. Kendati bisa hidup relatif baik sampai di hari tua, namun tidak sedikit jumlah kaum buruh yang cacat fisik, cacad mental, berpensiun dan mati muda, akibat kerja berat dalam waktu lama. Adapun yang dianggap memerlukan perbaikan, ketimbang yang berlaku di negeri-negeri sedang berkembang, tanpa perbaikan pun berada pada nilai yang jauh lebih tinggi. Maka pendidikan Sosialisme kepada massa kaum buruh setempat tidak mendapatkan tanggapan positif karena terbentur pada keadaan hidup yang dirasakan baik. Demikianlah gambaran umum sebagai latar belakang pikiran grup politik kiri di atas.

Adapun pada saat ini, kehidupan politik dan ekonomi kapitalis yang berperan dominan di Eropa Barat, bukan semata-mata di Jerman atau di Denmark di bawah pimpinan Gottfred Appell,

adalah hasil permainan di belakang layar kaum modal besar, kaum modal monopoli. Yaitu permainan berselaput, yang menipu, penuh rekayasa, dan hakekatnya menindas. Permainan itu bisa terjalin dalam hubungannya dengan partai Sosial Demokrat, partai Sosialis atau aliansi partai-partai tengah-kiri yang didukung oleh serikat buruh yang berada di bawah pimpinan kaum birokrat dan Aristokrasi buruh. Di samping itu bisa juga dengan partai kanan Konservatif atau kemitraan kelompok partai-partai tengah-kanan. Dalam rangka mempertahankan sistem kapitalisme dan membikin melem-pemnya gerakan revolusioner, permainan itu masih bisa dimanfaatkan selama tumpukan keuntungan kapitalis yang berunggun-unggun belum ludes. Di luar Eropa Barat, terutama di Amerika Serikat, tema pemanfaatan keuntungan kapitalis di sana untuk tujuan serupa, pada dasarnya tidak berbeda dan berefek sama. Hanya cara penanganannya dalam banyak hal lebih kasar ketimbang Eropa Barat. Maka sebagai urgensi masa sekarang yang pertama-tama perlu diperkuat dan dikembangkan adalah perjuangan rakyat negeri-negeri sedang berkembang, bukan negeri-negeri kapitalis berindustri maju pada umumnya. Perjuangan rakyat yang dimaksudkan adalah untuk mematahkan keunggulan ekonomi, politik dan militer negara-negara kapitalis berindustri maju dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan induknya. Maka partisipasi gerakan serikat buruh sebagai jalur pengorganisasian, pendidikan dan mobilisasi massa kaum buruh, khususnya di negeri-negeri sedang berkembang, adalah menyediakan peluang secukupnya, bahwa melalui prosedur demokratis, gerakan serikat-buruh bisa terisi dengan kader-kader dan pemimpin-pemimpin yang berhaluan revolusioner.

Dengan berdirinya Republik Demokrasi Jerman (*Deutsche Demokratische Republik*—DDR) di bagian Timur negeri, didirikan juga Gabungan Serikat buruh dengan nama *Freier Deutscher Gewerkschaftsbund* (FDGB). FDGB sebagai gabungan serikat buruh di negeri Sosialis pada prinsipnya tidak terikat oleh hubungan produksi kapitalis, selain yang bersangkutan dengan beberapa perusahaan swasta kecil yang tidak berperan dominan. Tugas pokok FDGB adalah menyelenggarakan kontrol kaum buruh terhadap pengorganisasian produksi sampai tercapainya kehidupan ekonomi Sosialis dengan tuntas. Partisipasi FDGB yang berperan penting antaranya adalah mengurusi jaminan ekonomi

dan sosial kaum buruh, menyelenggarakan pendidikan kejuruan, menjamin tidak adanya pengangguran dan berpartisipasi aktif dalam membebaskan keterlibatan DDR dari krisis ekonomi kapitalis. Gugurnya Uni Soviet, negara-negara Sosialis Eropa Timur dan restorasi kapitalisme di Tiongkok, bukan kefatalan Sosialisme. Kelemahan dan terdesaknya kekuatan revolusioner oleh kekuatan anti Sosialis di dalam negara Sosialis, serta bantuan kaum imperialis dari luar yang relatif masih kuat dalam usaha menghancurkan Sosialisme, adalah penyebab utamanya. Namun demikian, serikat buruh yang berperan seperti FDGB dan bekas negara-negara Sosialis lainnya tetap mempunyai tempat yang terluang di dunia ini. Bukan kapitalisme, tapi Sosialismelah hari depan kelas buruh dan masa rakyat yang kini hidup tertindas.

Gerakan serikat buruh di dunia Barat memang mempunyai tradisi lebih lama ketimbang di negeri-negeri sedang berkembang. Namun jika dikaitkan dengan perjuangan revolusioner, kader-kader dan pemimpin-pemimpin di Barat, khususnya yang menyatakan diri Komunis atau Sosialis, tidak memberikan teladan positif. Pada umumnya mereka hanya membanggakan kepandaian mereka dalam menangani kegiatan-kegiatan yang bernafaskan reformisme. Mereka memang bisa mem-buktikan diri dalam menguasai masalah-masalah yang bersangkutan dengan kepentingan langsung kaum buruh. Di dalam sidang-sidang internasional forum GSS misalnya, mereka bisa berdiskusi berhari-hari lamanya mengenai masalah-masalah mendetail yang bersang-kutan dengan penghidupan dan syarat-syarat kerja kaum buruh dalam batas hubungan produksi kapitalis. Namun dari kepandaian yang mereka perlihatkan, pada diri mereka terpantul watak arogan. Kemampuan kader-kader negeri-negeri sedang berkembang mereka pandang dengan mata sebelah. Misalnya, di dalam komisi-komisi yang khusus berurusan dengan gerakan serikat buruh di negeri-negeri sedang berkembang, selalu ditempatkan kader-kader dari Eropa, terutama kader-kader CGT dari Perancis. Padahal kader-kader Eropa itu tidak tahu banyak dan tidak menghadapi langsung keadaan sebenarnya yang berciri khas dan menjadi masalah bagi gerakan serikat buruh di negeri-negeri sedang berkembang. Di dalam komisi-komisi yang khusus bersangkutan dengan gerakan serikat-buruh di negeri-negeri Eropa tidak pernah diikutsertakan kader-kader dari negeri-negeri sedang berkembang. Dari

pengalaman di atas tampak, bahwa arogansi itu adalah subyektivisme sebagai pencerminan kompleks superior menghadapi kader-kader negeri-negeri sedang berkembang yang dipandang berkebudayaan rendah, tanpa melihat nilai kenyataan obyektif. Di bidang gerakan serikat buruh arogansi itu tidak lain adalah pameran perangai Aristrokasi buruh yang bertumpu pada *status quo* membiarkan tidak bergemingnya sistem produksi kapitalis, yang menegasi prinsip mengkaitkan gerakan serikat buruh dengan perjuangan revolusioner.

Menegasi prinsip mengkaitkan gerakan serikat buruh dengan perjuangan revolusioner yang berarti kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan serikat buruh hanya membatasi diri pada menangani kegiatan-kegiatan reform sebagai garis haluan, adalah *reformisme.* Namun bentuk reformisme tidak hanya itu saja. Gerakan serikat buruh menggantikan peran partai kelas buruh adalah *reformisme* juga. Sebabnya massa kaum buruh anggota yang berkomposisi luas, apalagi mayoritasnya, tidak semua bersedia menerima program politik partai kelas buruh yang berkarakter revolusioner. Massa kaum buruh yang tidak tanggap terhadap perjuangan revolusioner hanya bersedia memanfaatkan hasil kegiatan-kegiatan reform setinggi nilai yang bisa diberikan oleh pasar kapitalis. Maka gerakan serikat-buruh karenanya tidak bisa lain kecuali terhenti langkahnya pada niveau reformisme. Gerakan serikat-buruh obyektif tidak mempunyai syarat untuk mengambil alih peran partai kelas buruh yang jangkauan programnya melewati batas kemampuan yang bisa dicapai oleh gerakan serikat buruh. Partai kelas buruh adalah organisasi tertinggi yang memimpin perjuangan revolusioner memasuki Sosialisme. Program partai kelas buruh tidak hanya terbatas pada menangani masalah-masalah reform seperti serikat buruh. Tidak pula terbatas pada kepentingan mengorganisasi, mendidik dan memobilisasi massa kaum buruh saja, tapi juga massa dan kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat. Selanjutnya *Reformisme* masih tercermin lagi dengan politik sebuah partai, bisa dengan menyebutkan nama "komunis," "buruh" atau "pekerja," tapi hanya bertumpu pada menangani masalah-masalah reform *seniveau* serikat buruh, serta tidak mempunyai program apalagi aksi kongkrit dalam perjuangan revolusioner.

Di negeri-negeri di luar dunia Barat, tidak banyak ciri-ciri khas gerakan serikat buruh yang menonjol. Namun gerakan serikat buruhnya yang muncul belakangan ketimbang di Barat, pada umumnya lebih banyak bersentuhan dengan kehidupan politik dan dengan perjuangan kemerdekaan nasional. Perangai Aristokrasi buruh di kalangan kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan serikat buruh tidak mendapatkan lahan persemaian yang subur dan permuculannya lebih berselingkuh, tidak semarak seperti di Barat. Massa kaum buruhnya, dibandingkan dengan di Barat hidupnya jauh lebih tertekan. Aksi-aksi massa kaum buruh yang diorganisir oleh serikat buruh dan banyak terdengar di luar negeri adalah di Asia dan Pasifik. Di Amerika Latin yang gerakan serikat buruhnya terdengar kuat adalah di Venezuela. Pemogokan massa kaum buruh minyak di sana menentang kemandulan politik ekonomi presiden Chavez yang terkenal kiri, bisa diorganisasi selama berhari-hari dan mampu menghentikan produksi minyak. Di Brazilia, presiden Lulla yang terpilih adalah bekas ketua serikat buruh dan politiknya didukung oleh golongan kiri. Ia berasal dari keluarga miskin dan di waktu mudanya pernah bekerja sebagai tukang semir sepatu di jalanan. Di Argentina, kaum Peronis mempunyai pengaruh tidak kecil di kalangan gerakan serikat buruh. Adapun di Afrika gerakan serikat buruhnya tidak banyak terdengar kemenonjolannya.

Di Asia, beberapa gabungan besar serikat buruh terdapat di Jepang. Yang terbesar adalah Nihon Rodo Kumiai Sohyogikai, populer dengan sebutan Sohyo. Jumlah potensial anggotanya adalah pegawai negeri. Yang kedua besarnya adalah hasil penggabungan dua organisasi serikat buruh sektor swasta. Yaitu Zen Nihon Rodo Sodomei, nama populernya Domei, dan Churitsu Roren. Nama organisasi sesudah bergabung menjadi satu adalah Rengo. Serikat-serikat buruh anggota Sohyo di luar pegawai negeri pada tahun 1990 meleburkan diri ke dalam Rengo. Sebuah gabungan serikat buruh masih ada lagi, tapi kecil, namanya Shinsanbetsu. Di luar Jepang aksi-aksi massa kaum buruh kini tidak banyak terdengar. Tidak seperti pada tahun-tahun 1960-an. Pada saat itu, nama Sohyo dengan Sekretaris Jenderalnya Akira Iwai, cukup terkenal. Tidak saja di Jepang, tapi juga di negeri-negeri di luarnya. Kader-kader dan pemimpin-pemimpin Sohyo ketika itu tidak hanya aktif menangani masalah-masalah yang bersangkutan langsung dengan

perbaikan nasib dan syarat-syarat kerja massa kaum buruh. Dalam rangka membela kebebasan nasional dan perdamaian dunia, mereka aktif memobilisasi massa menentang pangkalan perang Amerika. Beberapa serikat buruh anggotanya yang penting seperti serikat buruh transpor dan percetakan dipimpin oleh kader-kader Komunis.

Meskipun Sohyo adalah organisasi independen, pada waktu itu ada hubungan kerjasama baik dengan GSS, begitu juga dengan SOBSI. Setiap tahunnya kedua organisasi itu diundang oleh Sohyo menghadiri kongresnya.

Adapun di Asia yang sekarang ini sering terdengar adanya pemogokan besar-besaran massa kaum buruh adalah di Korea Selatan. Gabungan serikat buruh terbesar di sana adalah FKTU (*Federation of Korean Trade Unions*). Yang nomor dua besarnya KCTU (*Korean Confederation of Trade Unions*). Keduanya berafiliasi dengan ICFTU. Di samping massa kaum buruh industri, kedua organisasi itu beranggotakan pegawai negeri juga. Adapun yang paling militan dan paling sering mengorganisasi pemogokan masal adalah KCTU, kendati organisasinya nomor dua besarnya. Pimpinan KCTU pada umumnya terdiri dari kader-kader yang berlatar belakang gerakan buruh dan gerakan rakyat yang maju. Organisasinya merupakan panjatan bagi terbentuknya Partai Buruh Demokratik (*Democratic Labor Party*, disingkat DLP—ejaan bahasa Amerika). Program perjuangan DLP didasari dengan "perjuangan rakyat Korea Selatan melawan invasi imperialis, melawan pemisahan menjadi dua negara, melawan penghisapan modal monopoli dan melawan diktatur militer." Di dalam manifesto politik DLP disebutkan, bahwa "rakyat Korea Selatan berkepentingan maju terus untuk pembebas-annya, untuk penyatuan kembali Korea Selatan dan Korea Utara, untuk Sosialisme serta kebebasan umat manusia di kemudian hari." DLP berprinsip juga pada "penggalangan solidaritas internasional kaum buruh, rakyat-rakyat serta nasion-nasion tertindas, untuk dunia yang adil dan damai." Di dalam gerakan serikat buruh, uluran tangan solidaritas DLP berdasarkan prinsip-prinsip di atas, bagi kader-kader dan pemimpin-pemimpin negeri-negeri lain yang berhaluan revolusioner penting untuk ditanggapi dan dimasuki secara kongkrit.

Gerakan serikat buruh di Filipina menunjukkan perannya yang cukup penting.

Pada tahun 1975 terjadi pemogokan bersejarah yang ditandai dengan adanya kebangkitan gerakan serikat-buruh yang militan. Pemogokan itu mendobrak dominasi serikat-serikat buruh yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan reaksi dan pro Marcos. Di bawah kediktatoran Marcos kaum aristokrat buruh mengorganisir sejumlah banyak kaum buruh di dalam apa yang disebut dengan Kongres Serikat buruh Filipina. Massa kaum buruh yang tidak gentar menghadapi kediktatoran Markos dihalangi untuk mengorganisir diri mendirikan *Bukluranng Manggagawang* (BMP—Persatuan Buruh Filipina). Namun demikian, pengorganisasian diri kaum buruh tidak berhenti di tengah jalan. Segi uniknya ialah bahwa di kalangan massa kaum buruh, kelompok-kelompok belajar di tempat-tempat kerja dan di tempat-tempat tinggal tumbuh terus.

Pada bulan februari 1981, Institut Ekumenik untuk Riset dan Pendidikan Buruh (EILER) didirikan oleh pemimpin-pemimpin buruh dan kalangan tertentu gereja.

Tugas utamanya mengembangkan kursus-kursus formal serikat buruh. Pada tahun 1987, EILER menerbitkan risalah pendidikan buruh yang disebut Serikat buruh Sejati (GTU). Mula-mula dikeluarkan dalam bahasa Filipina. Selanjutnya pada tahun 1988 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 1999 ke dalam bahasa Korea.[6]

Yang diketengahkan oleh GTU sebagai kursus dasar pertama, berkisar pada tahap perjuangan reform, meskipun sudah

[6] Kata-kata sejati sebaiknya tidak perlu disebutkan sebagai kualifikasi serikatburuh sebagai organisasi. Serikatburuh hanya berfungsi sebagai wahana menghimpun dan menarik seluas mungkin massa kaum buruh melalui kegiatan-kagiatan yang berkarakter reform. Nilai hasil yang bisa dicapai oleh gerakan serikatburuh di bawah pimpinan kader-kader revolusioner atau kader-kader reformis pada pokoknya tidak berbeda. Yang berbeda peran kader-kader revolusioner di dalam gerakan serikatburuh yang juga mengemban tugas di luar jangkauan gerakan serikatburuh. Yaitu mendidik meningkatkan kesedaran massa kaum buruh pada posisi sebagai kelas buruh untuk dibawa serta dalam perjuangan revolusioner membebaskan kelas buruh dari penghisapan kapitalis. Sedang kader-kader reformis jangkauannya hanya berhenti pada batas tetap terpenuhinya kebutuhan pasar kapitalis — pen.

menyoalkan masalah-masalah menge-nai kedaulatan nasional dan demokrasi. Adapun kursus dasar kedua di bawah bimbingan KPD (Kursus tentang Demokrasi Nasional), dimulai sejak tahun 1987.

Pada tahun 1991 oleh KPD dikemukakan Kursus Pengantar Sosialisme. Sebagai kelanjutannya adalah kursus ketiga. Di dalam kursus ini dijelaskan tentang makna Sosialisme sebagai masyarakat pembebas penghisapan dan pembudakan kapitalis. Di dalamnya dijelaskan jalan menuju Sosialisme dalam sebuah masyarakat semi kolonial dan semi feodal seperti Filipina, melalui kemenangan perjuangan untuk demokrasi nasional. Di samping jalan menuju Sosialisme, dasar-dasar ilmiah dan arti Sosialisme didiskusikan dalam kursus ini.

Perkembangan unik gerakan serikat buruh Filipina dewasa ini munjukkan keberadaannya pada taraf yang lebih maju ketimbang Indonesia. Tanpa melepaskan ciri-ciri khas yang berlaku di Indonesia, mempelajari gerakan serikat buruh Filipina pada tingkatnya yang sekarang adalah penting.

Ada masalah menarik berdasarkan pengalaman masa silam yang ada hubungannya dengan gerakan serikat buruh di India. Jika berbicara mengenai masalah organisasi serikat buruh, di sana ada AITUC (*All-India Trade Union Congress*) yang berdiri sejak th.1920, sebuah gabungan serikat buruh anggota GSS, dan pernah berhubungan baik dengan SOBSI. AITUC adalah panjatan bagi berdirinya Partai Komunis India (*Communist Party India*—CPI) pada th. 1925. Di samping AITUC ada INTUC (*Indian National Trade Union Congress*) dan HMS (*Hind Mazdoor Sabha*). INTUC dan HMS keduanya berafiliasi dengan ICFTU. Adapun yang menarik adalah tentang ketokohan kontroversial Shripad Amrid Dange (biasa ditulis S.A. Dange dengan panggilan Dange). Dange pernah lama berkedudukan sebagai Ketua Partai Komunis India (*Communist Party of India*—CPI) dan Sekretaris Jenderal AITUC. Pada masa polemik di dalam 'Gerakan Komunis Internasional' (GKI) sedang hangat-hangatnya berlangsung, Dange mengambil posisi memihak PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) dan anti PKT (Partai Komunis Tiongkok). Mengenai sengketa perbatasan antara India dan Tiongkok, Dange dengan terang-terangan mendukung pemerintah Nehru. Sikap memihak ini berefek negatif terhadap

homogenitas pimpinan CPI. Maka beberapa dari anggota pimpinan CPI, di antaranya Krisna Murti yang juga termasuk anggota pimpinan tertinggi AITUC, ada yang lalu memisahkan diri dan mendirikan partai baru dengan nama *Communist Party of India Marxist* (CPIM). CPI dan CPIM sekarang bisa bekerjasama, walaupun adanya perbedaan yang keluar tidak dinyatakan dengan kongkrit, belum sepenuhnya lenyap. Sebagian dari anggota pimpinan CPI yang memisahkan diri dan kemudian membangun CPIM, pernah memimpin pemerintahan 'negara bagian Kerala.' Pada tahun 1997 CPIM bersama-sama dengan *Janata Dal Party* dan beberapa partai dari daerah-daerah mempunyai wakil di dalam pemerintahan Front National sebagai aliansi partai-partai tengah-kiri. CPIM terkenal sebagai partai yang bersih dari skandal korupsi. Di samping itu ada grup kecil yang sekarang ini oleh pers Barat dan pers burjuis disebut sebagai grup Maois. Nama grup ini "Communist Centre."

Berkat adanya hubungan baik dengan sementara anggota pimpinan AITUC, SOBSI pada th. 1962 diundang mengunjungi kongres AITUC di Coimbatore India. Delegasinya yang dipimpin oleh Nyono ada pengalaman langsung tentang bagaimana haluan politik Dange. Delegasi-delegasi luarnegeri yang mengunjungi kongres oleh Dange diminta supaya pidato sambutannya tertulis dan konsepnya diberikan kepada Dange sebelum pidato diucapkan. Sebelum delegasi SOBSI mendapatkan giliran berpidato, tahu-tahu Dange datang di kamar hotel delegasi SOBSI dengan membawa konsep pidato delegasi SOBSI. Dengan menunjukkan satu bait kalimat dari konsep pidato itu, Dange menyatakan ketidaksetujuannya. Kalimat yang tidak disetujuinya berisi saran, bahwa 'gerakan serikat buruh mempunyai hubungan berkait yang tidak hanya terbatas pada kegiatan perbaikan ekonomi dan sosial yang menjadi kepentingan langsung kaum buruh, tapi juga dengan perjuangan yang lebih tinggi dari itu.' Dange menganggap, bahwa khususnya rumus 'lebih tinggi' itu bisa ditafsirkan sebagai 'perjuangan bersenjata' dan supaya dihapus. Menurut Dange, dia berpegangan pada prinsip "*non violence*," dan maka dari itu tidak menyetujui perjuangan bersenjata. Jadi Dange mengikuti garis politik Gandhi. Pendirian Dange itupun tidak sesuai dengan garis partainya yang sejak gerakan "non koperatif" Gandhi dilancarkan, mengambil *plat-form* revolusioner dan lebih konsisten melawan

imperialisme dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Di samping yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan nasional, Dange juga menyatakan, bahwa mengenai perjalanan menuju Sosialisme dia pun tidak juga menyetujui penggunaan kekerasan senjata. Sikap politik Dange dalam hubungan ini berarti membuntuti garis Chrusjtjov tentang "jalan damai menuju Sosialisme." Sebagai tamu yang menghormati tuanrumah, delegasi SOBSI merubah kalimatnya dengan rumus baru yang bersifat umum. Isinya pada pokoknya hanya menekankan uluran tangan persahabatan dengan AITUC dan kaum buruh India yang berlandasan pada prinsip menjunjung tinggi hubungan setiakawan internasional kaum buruh.

Pada th. 1962 juga, di Peking diselenggarakan Sidang ke 26 Dewan Umum GSS (WFTU General Council). Ketika itu polemik di dalam GKI belum cukup terbuka. Yang oleh PKT sudah disebut langsung namanya sebagai tokoh yang berpandangan revisionis modern, baru Palmiro Togliatti, pemimpin utama Partai Komunis Italia. Meskipun PKT sudah melakukan perlawanan gencar terhadap revisionisme modern, melalui sebuah tulisan teoretis di dalam "Harian Rakyat" Peking sifatnya masih umum, tanpa "tunjuk hidung." Tulisan itu berjudul "Kibarkan Tinggi-Tinggi Panji-Panji Revolusioner Marxisme-Leninisme." Baru di dalam sidang GSS di atas, Liu Ning Ie, Ketua Gabungan Serikat buruh Tiongkok menyerang langsung Dange dengan 'tunjuk hidung.' Liu Ning Ie hanya menjangkar dalam menyebut nama Dange, tanpa dibubuhi dengan kata 'kawan' atau 'saudara.' Oleh Liu Ning Ie Dange dikatakan berkapitulasi terhadap Nehru ketika berada di dalam penjara. Pembuktian kongkrit kapitulasi Dange memang tidak ditunjukkan. Tapi sikap Dange mendukung dan secara terbuka menjadi terompet pemerintahan Nehru dalam sengketa perbatasan dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok), bagaimanapun juga membuktikan pembenaran terhadap apa yang dikemukakan oleh Liu Ning Ie.

Pada waktu pembukaan kongres berdirinya GSS, ada bagian dari isi pidato sambutan Dange yang memancing kontroversi. Yaitu yang menyatakan demikian: "bagi kelas buruh kami, masalah yang sederhana adalah kemerdekaan nasional dan oleh karenanya rakyat kami mengambil bagian dalam gerakan serikat buruh internasional"

(Siaran versi Perancis tertanggal 27-06-'02 menyambut Kongres GSS di New Delhi antara 25 sampai 28 Maret 2000, hal. 3). Di dalam halaman sama disitir juga reaksi Walter Citrine dari British TUC yang menyatakan, bahwa "ia tidak berpendapat GSS adalah medium untuk melaksanakan maksud itu. Jika kita sampai terlibat dalam kegaduhan politik .....organisasi internasional ini akan menjadi berantakan." Di dalam halaman di atas ditambahkan, bagaimana Kupers dari Negeri Belanda yang mewakili NVV (*Nederlands Verbond van Vakverenigingen*) naik ke atas mimbar dengan ucapan bernafas sama seperti Walter Citrine. Ia tidak membenarkan perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan nasional. Keduanya, Walter Citrine dan Kupers adalah tokoh-tokoh socio imperialis yang merasa tersinggung karena negara-negara majikan mereka terancam oleh gencarnya perjuangan rakyat India dan Indonesia untuk kemerdekaan nasional. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Dange itu. Meskipun sementara orang ada yang menilai Dange lebih sebagai seorang nasionalis ketimbang sebagai pejuang yang dijiwai internasionalisme proletar, di negerinya sendiri ia bukan tokoh yang berdedikasi luhur. Ia bukan pejuang yang konsisten anti imperialis. Sekarang ini yang menduduki posisi Sekretaris Jenderal AITUC adalah K.L. Mahendra. Oleh kongres GSS di New Delhi India th. 2000 yang sebagian isi siarannya dikutip di atas, ia dipilih menjadi Ketua GSS. Bagaimana kongkritnya politik kader-kader yang duduk di dalam pimpinan AITUC sekarang, sementara ini memang tidak jelas. Akan tetapi hal itu masih bisa dilihat dan dikaji lebih lanjut.

Ada kejadian lagi yang menarik, sementara Sidang Dewan Umum GSS di atas belum selesai berlangsung. Pada malam hari ketika sidang di-istirahatkan, pimpinan PKT menyelenggarakan ceramah di depan anggota-anggota Biro Eksekutif GSS. Ceramah dipimpin oleh Liu Shaoqi dengan dua orang pemrasaran, yaitu Deng Xiaoping dan Zhou Enlai. Berdasarkan acara yang disiapkan, Deng Xiaoping berprasaran mengenai "Perjuangan revolusioner rakyat-rakyat sedunia melawan imperialisme," sedang Zhou Enlai tentang "Masalah perang dan damai." Pemrasaran pertama adalah Deng Xiaoping yang ketika itu berkedudukan sebagai Sekretaris Jenderal PKT. Isi pokoknya meskipun tanpa tunjuk hidung, Deng Xiaoping membelejeti dengan nada keras politik Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) yang berpacu pada garis "jalan damai ke Sosialisme." Oleh

sementara pendengar ada kata-kata Deng Xiaoping yang ditanggapi bernada bombastis. Yaitu ketika ia menutup prasarannya dengan mengatakan, bahwa "menghadapi derap maju rakyat-rakyat sedunia dalam perjuangan revolusioner melawan imperialisme, baik seorang Nehru maupun seorang Soekarno tidak akan bisa menahannya." Di antara sementara pendengar ada yang berbisik-bisik, bahwa 'Nehru atau Soekarno seorang diri memang tidak akan mampu menahan derap maju rakyat-rakyat sedunia dalam perjuangan revolusioner melawan imperialisme. Hal itu adalah mustahil.' Sementara itu sebagai pernyataan protes, dengan dipelopori oleh Victor Grishin dari Uni Soviet, anggota-anggota Biro Eksekutif GSS dari Eropa Barat, Amerika Latin, India dan Eropa Timur termasuk juga dari Albania, secara demonstratif berdiri serempak begitu prasaran Deng Xiaoping selesai diucapkan. Mereka memboikot dengan tidak mau lagi mengikuti ceramah. Maka prasaran Zhou Enlai pun lalu dibatalkan juga. Sebelum para pengunjung ceramah meninggalkan ruangan, Liu Shaoqi sebagai pemimpin ceramah menyatakan, bahwa pimpinan PKT dalam waktu lama meragukan perlu tidaknya dibuka polemik dengan PKUS. Sesudah itu ceramah ia tutup sambil menganjurkan pentingnya tetap bersatu. Pernyataan sikap lunak Liu Shaoqi itu mengesankan adanya perbedaan dengan kata-kata Deng Xiaoping yang bernada keras, yang bagi orang luar merupakan teka-teki.

Sesudah terjadinya peristiwa di atas, polemik di dalam GKI semakin bertambah gencar dan terbuka. Sementara itu kontradiksi intern di dalam PKT mengenai dua garis politik yang prinsipiil bertentangan, menjadi terbuka sesudah dimulaiya Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP). Walaupun kata-kata Deng Xiaoping dalam ceramah di atas bernada keras, pengganyangan pertama oleh pasukan "Garda Merah" terhadap tokoh kanan "penempuh jalan kapitalis" justru dipicukan langsung kepadanya dengan seruan "Membom Markas Besar." Yang dimaksudkan dengan Markas Besar adalah kantor pusat PKT, di mana Deng Xiaoping sebagai Sekretaris Jenderal berkedudukan. Tokoh-tokoh lainnya di luar Deng Siaoping yang namanya telah disebut dalam bagian tulisan di atas dan diganyang oleh golongan kiri di dalam RBKB sebagai penempuh jalan kapitalis adalah Liu Shaoqi dan Liu Ning Ie. Di samping itu, menurut banyak pengamat, Zhou Enlai pun tidak terluput dari kecaman yang cukup keras, meskipun namanya tidak

disebut. Tampaknya yang dijadikan pertimbangan adalah pengaruh Zhou Enlai yang tidak kecil, baik di dalam partai dan negara maupun di kalangan rakyat. Ia disindir dengan diibaratkan sebagai Konfucius pada masa dinasti Zhou yang memulihkan perbudakan dengan merehabilitasi tuan-tuan budak kembali duduk di pentas kekuasaan. Adalah peran berpengaruh Zhou Enlai yang memberikan peluang bagi rehabilitasi Deng Xiaoping, sehingga ia bisa duduk kembali pada pimpinan PKT dan negara. Justru Deng Xiaopinglah orangnya yang bersosok sebagai aktor intelektualis dan arsitek restorasi kapitalisme di Tiongkok, yang dikemas dengan selaput sutera "Sosialisme berkeperibadian Tiongkok." Seperti yang dikatakan oleh Jiang Qing, 75% dari jumlah kader pimpinan PKT sebenarnya terdiri dari demokrat-demokrat burjuis. Di antara jumlah 75% tadi termasuk juga Deng Xiaoping, dan justru dialah yang ternyata malah "biang keladinya."

Menjelang Mao Zedong wafat, garis politik luarnegeri PKT yang sebelumnya menempatkan imperialisme Amerika sebagai musuh nomor satu rakyat-rakyat anti imperialis di dunia, tahu-tahu menjadi berubah. Dominasi imperialisme Amerika di dunia digeser ke samping. Perlawanan pokoknya malah dipicukan kepada kaum revisionis modern Uni Soviet yang mendominasi partai dan negara. Garis politik luarnegeri yang demikian justru memberikan kemudahan lebih besar bagi imperialisme Amerika untuk memperkuat dominasinya di dunia. Sedang Uni Soviet yang berada pada ambang kebangkrutan, bukan kekuasaan negara yang stabil. Pemimpin-pemimpin Partai Komunis Uni Soviet (PKSU) memang berpandangan revisionis dan di dalam kekuasaan negara memerankan politik socio imperialis. Kendati demikian mereka tidak bisa dikatakan sebagai kekuatan politik yang di dunia berperan dominan. Hal itu tergambar di dalam tulisan Gorbatjov *Perestrojka*. Di Indonesia terlihat dari sikap politik golongan militer pada era Soekarno. Persenjataan militer Indonesia ketika itu memang banyak didapatkan dari Uni Soviet. Namun pendidikan militer yang lebih banyak dimanfaatkan adalah yang berpola Amerika. Golongan militer Indonesia yang kebanyakan kader-kadernya berasal dari golongan tengah, pada umumnya lebih berkecenderungan pro Amerika dan anti Soviet. Pendidikan kemiliteran di luar Indonesia yang umumnya dipilih adalah di Amerika Serikat. Keadaan demikian justru memberikan manfaat

bagi naiknya Soeharto yang anti Komunis ke pentas kekuasaan. Apalagi sekarang dengan membanjirnya negara-negara bekas Sosialis Eropa Timur menjadi anggota NATO. Kekuatan militer negara-negara itu yang persenjataannya pada pokoknya berasal dari Uni Soviet, sebaliknya dari memperkuat posisi negara-negara Sosialis, kini justru mengabdi sistem kapitalisme karena masuk ke dalam lingkup strategi NATO yang berada di bawah komando Amerika Serikat.

Adapun ucapan Deng Xiaoping di atas yang bernada keras, jika dikaitkan dengan kenyataan struktur masyarakat Tiongkok sekarang adalah tendensius. Ucapan itu memberikan kesan, bahwa kekuatan kanan di dalam PKT menumpangi penggayangan kekuatan kiri terhadap kaum revisionis modern Uni Soviet, justru untuk merangkul kaum imperialis Amerika membantu Tiongkok menyiapkan restorasi kapitalisme. Uni Soviet dan negara-negara Sosialis Eropa Timur kini sudah tidak ada lagi. Peran politik paling dominan imperialisme Amerika di dunia, sekarang ini tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan politik tandingan lainnya yang bisa mengimbangi apalagi mengunggulinya tidak ada.

Bagaimana perkembangan situasi Tiongkok sekarang? Nama partai masih dipertahankan memakai etiket Komunis. Karena pengaruh Mao Zedong berakar dalam di kalangan massa, ia formal masih dielu-elu dan menempati posisi tertinggi sebagai lambang kebesaran partai, negara dan perjuangan pembebasan. Sedikit kritik versi Deng Xiaoping memang ditampilkan. Yaitu dikatakan bahwa pada masa akhir hidupnya, Mao Zedong tidak mampu lagi menerapkan pikiran tepat pada perkembangan situasi baru. Adanya kontradiksi dasar, kontradiksi antara burjuasi dan proletariat ditutupi, pada hal sistem produksi kapitalis berperan dominan di dalam masyarakat Tiongkok dewasa ini. Di samping berfungsi sebagai stimulans pelancaran restorasi kapitalisme, menghidupkan apa yang disebut dengan *Demokrasi Sistem Multi Partai* berfungsi juga sebagai selaput otoriterisme pimpinan PKT dan negara. Kongres ke 16 PKT dengan pembaruan sebagian besar anggota pimpinannya dan dengan menonjolkan Hu Jintao, seorang insinyur dan teknokrat sebagai sekretaris jenderal partai, tampak dijadikan impulsi untuk lebih menggebukan pembangunan kapitalisme. Serikat buruh yang ketika RBKP sedang hangat-hangatnya berlangsung dibekukan,

kini walaupun telah dipulihkan kembali tidak banyak terdengar kegiatannya, terutama di luar Tiongkok. Dengan hanya melihat bentuk luarnya saja, masih terdapat orang yang mempunyai ilusi, bahwa struktur masyarakat Tiongkok dewasa ini fundamentil tidak ada bedanya dengan pada era Mao Zedong. Namun, bagaimanapun juga belang masyarakatnya yang berakar pada sistem produksi kapitalis tidak bisa ditutupi terus-menerus, kendati secara keren dirias dengan "Sosialisme berkeperibadian Tiongkok." Merembes dan berkembangnya kapitalis-kapitalis yang menempati posisi politik, bukan ketidaksengajaan. Gejala-gejala negatif di Tiongkok yang hanya terjumpai di dalam masyarakat kapitalis seperti krisis ekonomi, pengangguran dan pemogokan kaum buruh, sudah lama bocor ke luar.

Di daerah Pasifik adalah di Australia yang gerakan serikat buruhnya mempunyai tradisi lama. ACTU (*Australian Council of Trade Unions*) merupakan satu-satunya gabungan serikat buruh dan berafiliasi dengan ICFTU. Yang mendominasi pimpinan ACTU adalah kader-kader Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party*—ALP—ejaan bahasa Australia). Di Australia Partai Buruh dinilai sebagai partai Sosial Demokrat, partai kapitalis-liberal yang merupakan sayap kiri partai burjuis. Partai Buruh di sana tergolong salah satu dari partai utama burjuasi yang dengan partai Konservatif silih-berganti mendominasi kekuasaan politik. Tokoh Partai Buruh seperti Bob Hawke, bekas sekretaris ACTU dan bekas perdana menteri, adalah seorang milyoner. Sedang Bill Kelty, salah seorang tokoh utama ACTU, adalah seorang tokoh di dunia finans juga, yang antara th. 1985-1997 duduk di dalam Komite Sentral Kesatuan Perbankan swasta (*Reserve Bank*) Australia.

Disilusi massa kaum buruh terhadap politik dan aksi Partai Buruh dari hari ke hari semakin bertambah kuat. Adanya Partai Buruh sebagai partai kapitalis-liberal merupakan kendala terhadap usaha meningkatkan kesedaran kelas massa kaum buruh. Dari titik tolak itu lalu dipandang perlu berdirinya partai Sosialis yang bukan aparat politik burjuasi dan mempunyai program perjuangan revolusioner. Maka sekarang ini telah ada *Partai Sosialis Demokratik* (*Democratic Socialist Party*). Bukan *Partai Persamaan Sosialis* (*Socialist Equality Party*), partai Trotskyis yang merupakan seksi Internasionale IV. Di daerah selatan Australia, beberapa serikat buruh penting yang

dipimpin oleh kader-kader dan pemimpin-pemimpin Sosialis, telah melepaskan afiliasi dengan ACTU. Di antaranya yang paling besar adalah Serikat buruh Manufaktur Australia (*Australian Manufacturing Workers Union*—AMWU) dengan jumlah anggota 20.000 kaum buruh.

Di dalam sejarah, adalah pemerintah Australia yang pada th. 1942 menampung pengungsian aparat pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia setelah dipukul mundur oleh Jepang dalam peperangan. Sesudah pada th. 1945 perang selesai, pemerintahan buruh Australia di bawah pimpinan perdana menteri John Curtin, membantu merestorasi kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Namun gerakan serikat-buruh Australia yang berada di bawah pimpinan kader-kader dan pemimpin-pemimpin kiri menentangnya. Terutama kader-kader dan pemimpin-pemimpin kiri yang memimpin serikat-serikat buruh bidang pelabuhan dan pelayaran, aktif dalam komite-komite pendukung kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar anggota komite-komite itu terdiri dari bekas tawanan politik Indonesia yang dari Irian Barat dipindahkan ke Australia dan tempat tinggalnya terpencar-pencar. Di dalam Lembaga Persahabatan Australia-Indonesia di mana kemerdekaan Indonesia aktif dikampanyekan, yang mendapatkan sokongan juga dari kalangan bisnis dan gereja, serikat-serikat buruh adalah pemberi dukungan paling kuat. Serikat buruh Pelaut Australia (*Seamen's Union of Australia*—SUA) dengan E.V. Elliott sebagai pemimpin utamanya, aktif memimpin pengorganisasian aksi-aksi solidaritas membantu perjuangan rakyat Indonesia membebaskan diri dari kolonialisme Belanda. Ketika itu SUA aktif membantu pemogokan 2000 pelaut Indonesia yang hidupnya tergencet. Sebagai hasilnya, pelaut-pelaut Indonesia itu upahnya dinaikkan dari £ 2,- menjadi £ 22,- setiap bulannya dan waktu kerjanya diperpendek menjadi 8 jam sehari. Adapun bantuan berkarakter politik yang penting ialah, bahwa kaum buruh dari 31 serikat buruh bidang pelabuhan dan pelayaran Australia aktif memboikot pemuatan apa saja, terutama alat-alat perang, yang merupakan kepentingan Belanda memusuhi rakyat Indonesia yang sedang berjuang untuk kemerdekaan nasional. Pada saat dan tujuan yang sama, mereka juga menolak memanfaatkan galangan kapal untuk memperbaiki kapal-kapal Belanda. Aksi boikot kaum buruh Australia itu dilakukan tanpa menghitung resiko kehilangan upah

dalam jumlah uang yang tidak sedikit. Di samping itu, sebagai pernyataan solider terhadap perjuangan rakyat Indonesia di Indonesia, empat serikat buruh pelaut dari negeri-negeri Asia, yaitu India, Tiongkok, Malaya dan Indonesia yang diorganisir di Sydney, ikut aktif juga melakukan aksi boikot. Kesinambungan tradisi di atas masih berlang-sung sampai sekarang. Pada th. 1996 Serikat buruh Maritim (*Maritime Union of Australia*—MUA) di Darwin, pelabuan Barat, mengorganisir kaum buruh pelabuhan Australia memboikot kapal pengangkut barang (cargo) Indonesia. Aksi itu adalah pernyataan solider terhadap gerakan serikat buruh Indonesia pada waktu Mohtar Pakpahan ditahan oleh rezim diktatur Militer Soeharto, di samping sebagai protes terhadap tindakan anti demokratis rezim itu dalam peristiwa 27 juli 1996. Di luar aksi boikot di atas, pada th. 2001 MUA berhasil membantu memperjuangkan pembayaran kembali $150.000,- untuk dua orang pelaut Indonesia yang bekerja pada kapal Unison. Adanya hubungan solidaritas antara gerakan serikat buruh Indonesia dan Australia, khususnya yang dipimpin oleh kader-kader dan pemimpin-pemimpin kiri, penting untuk dikonsolidasi dan dikembangkan. Adalah tugas kader-kader dan pemimpin-pemimpin revolusioner di dalam gerakan serikat buruh untuk meningkatkan hubungan solidaritas pada taraf serikat buruh, menjadi ikatan setiakawan yang kuat antara kelas buruh Indonesia dan Australia yang dijiwai internasionalisme proletar.

3. Pelajaran yang diberikan oleh sejarah gerakan serikat buruh Indonesia

Sebelum memasuki abad ke 20, pada th. 1897 telah berdiri sebuah serikat buruh yang mengorganisir para guru dengan nama *Nederland Indische Onderwijs Genootschap* (Perserikatan Pendidikan Hindia Belanda). Oleh karena tidak berperan menonjol, tidak banyak yang mengenalnya di dalam sejarah. Baru pada awal abad ke 20, serikat-serikat buruh mulai bermunculan seper-ti jamur di musim hujan. Sebuah serikat buruh yang paling terkenal militansinya dan dibentuk pada masa awal abad ke 20 adalah VSTP. Di luar VSTP, sebelumnya sudah ada serikat buruh kereta api. Yaitu SS Bond, serikat buruh yang mengorganisir kaum buruh kereta api dinas negara (*Staats Spoor*—SS), sedang VSTP meng-

organisir kaum buruh kereta api perusahaan swasta NIS (*Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij*). Namun banyak anggota SS Bond yang kemudian pindah menjadi anggota VSTP. Sebabnya karena kegiatan VSTP terbukti lebih dapat diandalkan membela kepentingan massa kaum buruh kereta api. Banyak dari anggota pimpinan VSTP terdiri dari kader-kader kiri. Di antara tokoh-tokohnya yang terkemuka adalah Semaun. Maka lahirnya ISDV pada th. 1914 sebagai partai politik yang berhaluan Sosialis dan mempunyai program perjuangan revolusioner, disambut hangat oleh pimpinan VSTP. Malah VSTP kemudian mengakui ISDV sebagai pimpinan politiknya. Namun dengan mengakui ISDV sebagai pimpinan politik, pada pimpinan VSTP berarti masih tidak ada kejelasan tentang pentingnya menarik massa kaum buruh yang belum tanggap terhadap perjuangan revolusioner, perjuangan untuk membangun Sosialisme. Dengan demikian terdapat faktor peng-hambat yang bisa mengurangi keluasan pengaruh VSTP terhadap massa kaum buruh. Pada pimpinan VSTP tidak ada penggarisan yang jelas, bahwa serikat buruh organisatoris bukan bawahan (*onderbouw*) partai politik. Serikat buruh adalah organisasi demokratis massa luas kaum buruh, tanpa membedakan faktor agama,jenis kelamin, pandangan hidup, kategori etnik, nasionalitas dan aliran politik. Meskipun tuntutan-tuntutan dan aksi-aksi serikat buruh pada dasarnya berkarakter reform, tapi tidak berarti tidak ada samasekali kaitannya dengan perjuangan revolusioner. Memang bukan tugas serikat buruh sebagai organisasi, melainkan kader-kader dan pemimpin-pemimpin revolusioner di dalam gerakan serikat buruh yang mengemban beban mulia menarik massa luas kaum buruh untuk dididik dan dibawa ke perjuangan revolusioner. Adalah wajar jika prinsip-prinsip di atas bagi pimpinan VSTP belum cukup tercekam. Sesuai dengan tingkat perkembangan gerakan serikat buruh Indonesia ketika itu, VSTP masih berada pada masa remaja. Hanya burjuasi reaksioner, golongan-golongan dan oknum-oknum yang hakekatnya anti kelas buruh yang sampai sekarang menutup mata terhadap prinsip-prinsip di atas. Mereka berkepentingan membatasi dan jika mungkin menumpas pengaruh pejuang-pejuang revolusioner kelas buruh terhadap massa luas kaum buruh. Maka tergantung pada syarat-syarat obyektif yang berlaku, mereka berdalih bahwa serikat buruh adalah organisasi bawahan partai politik atau politis netral.

Pada massa yang sama, di luar VSTP memang terdapat tidak sedikit jumlah serikat buruh. Di antaranya ada lagi yang penting dan yang di samping VSTP termasuk menjadi incaran utama pemerintah kolonial Belanda, yaitu Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB). PPPB termasuk kategori serikat buruh yang besar ketika itu. Anggotanya ada di seputar 5000 kaum buruh, sedang VSTP kira-kira 8000-an. PPPB adalah sebuah serikat buruh yang pada tahun 1922 mengorganisir pemogokan terbesar pertama di Indonesia, pemogokan yang meliputi pegawai-pegawai Rumah Gadai yang tersebar luas di pulau Jawa (orang-orang dari generasi lama lebih mengenalnya sebagai "pandhuis staking"). Pemimpinnya yang terkemuka adalah Soerjopranoto. Seorang bertitel Raden Mas, anggota keluarga ningrat Pakualaman, kakak satu ayah Ki Hadjar Dewantoro, dan pendiri pawiyatan pendidikan "Adidarma". Ia bukan Komunis, tapi berpendirian radikal anti kolonialisme Belanda. Aksi mogok dimulai dengan dipecatnya seorang pegawai rendahan di Jawatan Pegadaian Ngupasan Yogyakarta. Suatu aksi yang merupakan jawaban terhadap rencana "penghematan" (*bezuiniging*) pemerintah kolonial Belanda yang di Jawatan Pegadaian bermaksud memecat 20% dari jumlah pegawainya di seluruh pulau Jawa.

Adalah suatu pengalaman negatif bagi gerakan serikat buruh Indonesia, bahwa pemogokan berakhir dengan dipecatnya tidak kurang dari 2000 kaum buruh pegadaian. Pemogokan bukan suatu revolusi. Namun andaikata massa kaum tani di desa bisa dimobilisasi untuk membantu dalam bentuk apa saja yang bisa dimungkinkan pada saat itu, pemogokan tetap bisa dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti gagalnya pemberontakan rakyat th. 1926. Sedang burjuasi nasional bersikap ragu-ragu seperti yang tercermin pada sikap Sarekat Islam (SI). Partai-partai golongan tengah lainnya, terutama Budi Utomo yang moderat, menyatakan simpati kepada perjuangan kaum buruh pegadaian karena terpaksa. Bukankah jika tidak demikian Budi Utomo bisa kehilangan muka karena yang dilawan kekuasaan kolonial Belanda yang dibenci oleh rakyat?

Adapun sebagai kaji komparatif bisa dikonstatasi, bahwa gerakan serikat buruh Indonesia pada saat pemogokan di atas berlangsung, berbeda dengan kondisi di Barat sekarang pada umumnya. Di Barat

dewasa ini tidak ada kekuasaan politik yang represif seperti di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda. Selama sistem kapitalisme tidak tersintuh, di Barat ada kehidupan demokratis yang relatif longgar dan pemogokan tidak dilarang. Banyak serikat buruh di Barat yang finansiil kuat, sehingga pemogokan di Barat pada umumnya bisa bertahan lama dan banyak yang berhasil. Keadaan obyektif di Indonesia pada saat pemogokan di atas berlangsung, menunjukkan tidak adanya kelonggaran kehidupan demokratis seperti di Barat sekarang, meskipun pengorganisasian massa kaum buruh dalam serikat buruh tidak dilarang. Namun gerakan buruh, terhitung juga gerakan serikat buruh, masih berada pada taraf remaja, belum cukup berpengalaman dan belum kuat. Begitu juga gerakan rakyat pada umumnya. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda sedang menghadapi bencana krisis ekonomi dunia yang melanda Indonesia juga. Karena tahu tentang kelemahan gerakan buruh dan gerakan rakyat Indonesia pada saat itu, sebagai pelaksanaan "penghematan" mengatasi krisis ekonomi, pemecatan tidak kurang dari 2000 kaum buruh pegadaian oleh pemerintah kolonial Belanda dipaksakan menjadi kenyataan.

Untuk mencegah sambung-menyambungnya pemogokan, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan berlakunya artikel 161 bis, yang secara populer terkenal sebagai undang-undang larangan mogok. Maka pemogokan kaum buruh kereta api yang kemudian menyusul, yang dilihat dari jumlah pesertanya lebih besar ketimbang pemogokan kaum buruh pegadaian, oleh pemerintah kolonial Belanda ditindas dengan kekerasan militer. Pemogokan akhirnya mengalami kegagalan juga. Semaun sebagai ketua komando aksi dijatuhi hukumam dibuang ke Timor. Atas permintaan sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda Semaun diperbolehkan meninggalkan Indonesia. Pada bulan Mei th.1923 ia meninggalkan Indonesia menuju Uni Soviet, di mana di sana ia tinggal lama sampai beristeri dan beranak. Pada saat menjelang kepulangan ke Indonesia pada th. 1953, Semaun bekerja sebagai penyiar berbahasa Indonesia pada radio Moskow. Anaknya laki-laki yang bernama Rono bisa berbahasa Indonesia dan pernah ditugaskan sebagai penerjemah sebuah delegasi serikat buruh Indonesia yang berkunjung di Uni Soviet. Di samping anak Semaun, anak laki-laki Muso yang bernama Musman pun pernah juga tampil sebagai penerjemah bahasa Jerman dalam sebuah

konperensi internasional serikat buruh yang diselenggarakan di Moskow. Beda dengan Rono, Musman tidak bisa berbahasa Indonesia. Ia ditinggal ayahnya ketika masih kanak-kanak dan dibesarkan di Jerman.

Adapun perjalanan hidup pribadi Semaun ada segi-seginya yang kontroversial. Pada masa mudanya Semaun sudah menjadi tokoh sentral gerakan buruh dan gigih melawan politik kolonialisme Belanda.

Kemenangan Revolusi Sosialis Russia disambutnya dengan antusiasme yang tinggi. Ketika pada th. 1919 diselenggarakan suatu konperensi di Yogyakarta untuk membentuk gabungan serikat buruh (vaksentraal), terjadi perdebatan sengit yang memakan waktu lama dalam menentukan nama. Dengan semangat tinggi Semaun mengusulkan nama dengan menyebut-nyebut istilah "sosialis", "revolusioner" dsb. Hanya Alimin yang khawatir, penyebutan istilah semacam itu bisa menimbulkan sektarisme. Artinya bisa mempersempit pengaruh gerakan serikat buruh, terutama yang berada di bawah pimpinan kader-kader kiri. Maka menurut Alimin nama yang diusulkannya adalah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Dengan usulnya itu Alimin menjelaskan, bahwa ia sepenuhnya membela Revolusi Sosialis Russia. Adapun tentang nama adalah masalah lain. Usul Alimin itu diterima bulat oleh semua delegasi dan akhirnya berdiri sebuah gabungan serikat buruh pertama di Indonesia dengan nama PPKB. Semaun dipilih menjadi ketua, dan Soerjopranoto wakil ketua. Namun PPKB ini tidak berumur panjang. Sesudah Semaun tidak berada lagi di Indonesia, sebuah Sekretariat Gabungan Serikat buruh Merah Indonesia dibentuk oleh *Hoofdbestuur* (Comite Central) PKI pada tahun 1924, sesuai dengan keputusan Konperensi Internasional Pan Pasifik di Kanton pada tahun yang sama. Sekretariat organisasi ini diketuai oleh Aliarcham. Di samping dengan sebutan *merah* berarti membatasi jangkauan pengaruh di kalangan massa kaum buruh, sekretariat organisasi ini tidak juga berumur panjang karena menyusulnya pemberontakan rakyat th. 1926 yang mengalami kegagalan.

Semaun yang pada masa mudanya berwatak radikal dalam memimpin perjuangan buruh di Indonesia, sesudah hidup di luar

negeri tampak berubah. Rupanya ia kecewa melihat kekurangan-kekurangan pada tingkat awal pembangunan Sosialisme di Uni Soviet, yang tidak sesuai dengan idamannya tentang "masyarakat sama rata sama rasa" yang pernah ia tulis menjadi buku. Pada th. 1926 ia menanda tangani sebuah perjanjian dengan Mohammad Hatta yang ketika itu berkedudukan sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia (PI). Perjanjian itu terkenal dengan nama "Concept Overeenkomst Semaun-Hatta," atau sering juga disederhanakan dengan sebutan "Conventie Semaun-Hatta." Perjanjian itu pada pokoknya berisi pengakuan, bahwa 'PI supaya menjadikan dirinya sebagai pimpinan inti dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gerakan rakyat di Indonesia. Sedang PKI berkeharusan mengakui kepe-mimpinan PI dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadanya.' Dengan perjanjian itu Semaun mendapatkan tentangan keras dari banyak anggota PKI, sedang Komintern mengritiknya dengan pedas. Kemudian Semaun formil melakukan otokritik, tapi isinya tidak mendalam dan tampak hanya bersifat basa-basi saja. Antara lain ia menyatakan, bahwa 'perjanjian politik tersebut diadakan karena pada waktu itu tidak dapat berhubungan dengan anggota-anggota PKI dan tidak dapat berhubungan dengan pimpinan Komintern'. Namun tindakan Semaun mengadakan perjanjian dengan Hatta tersebut berarti menggantungkan perjuangan kelas buruh pada politik burjuasi dan mengebiri kebebasan politik PKI sebagai partai kelas buruh. Maka dari sudut pandang perjuangan revolusioner kelas buruh dan PKI, tindakan itu tidak lain adalah *kapitulasionisme* dan *likwidasionisme* sekaligus. Sesudah Semaun berada kembali di Indonesia, ia tidak bergabung lagi dengan PKI, tapi dengan Partai Murba. Bedanya dengan Tan Malaka, ia tidak terdengar aktif memusuhi politik PKI.

Pasca penanda tanganan perjanjian KMB, ada pengalaman penting lagi mengenai gerakan serikat-buruh Indonesia. Kader-kader kiri yang dikejar-kejar oleh polisi selama peristiwa Madiun 1948, pada permulaan tahun 1950 banyak yang bangkit kembali dan mengorganisasi serikat buruh. Ada rencana aksi pemogokan yang menciptakan situasi, di mana di dalam kehidupan gerakan serikat buruh Indonesia selama era Soekarno, sejak th.1951 tidak dikenal adanya pemogokan. Rencana aksi pemogokan itu adalah keputusan KABM (Kesatuan Aksi Buruh Minyak), terdiri dari tiga serikat buruh minyak yang menyiapkan peleburan atau fusi menjadi

PERBUM (Persatuan Buruh Minyak). Tiga serikat buruh minyak itu adalah PERBUM sebelum berfusi yang berpusat di Palembang, SBTMI (Serikat buruh Tambang Minyak Indonesia) yang berpusat di Surabaia dan SBM (Serikat buruh Minyak) yang pusatnya dari Yogyakarta dipindahkan ke Jakarta. Pemogokan yang direncanakan meliputi sekitar 19.000 kaum buruh minyak di seluruh Indonesia yang bekerja pada perusahaan minyak modal monopoli Belanda BPM (*Bataafse Petroleum Maatschappij*). Tepat satu hari sebelum pemogokan dimulai, pemerintah Indonesia lewat menteri perburuhan Soechiar Tedjasoekmana mengumumkan *Undang-Undang Darurat Larangan Mogok*. Ketika itu perdana menterinya adalah Muhammad Natsir dari partai kanan Masyumi. Larangan mogok tersebut menunjukkan, bagaimana kolonialisme yang sudah layu masih bisa dihidupkan kembali melalui perjanjian KMB dengan warna baru, yaitu berupa *neo kolonialisme*. Meskipun Indonesia formal diakui kemerdekaannya dengan perjanjian KMB, namun kehidupan ekonominya tetap didominasi oleh kapital monopoli asing, terutama Belanda. Maka kaum kapitalis monopoli Belanda tidak lagi langsung menggunakan tangan besinya menindas pemogokan kaum buruh yang bekerja pada perusahaan BPM. Tidak seperti pada masa kekuasaan kolonial Belanda sebelum Perang Dunia II. Untuk menindas pemogokan dipinjam tangan penguasa burjuasi reaksioner Indonesia yang diwakili oleh Natsir dan Tedjasoekmana, keduanya dari partai Masyumi.

Dalam bentuk imajinatif ada yang beranggapan, bahwa kesatuan lapangan kerja yang berperan paling vital dalam gerakan serikat buruh adalah sektor transpor. Namun, betapapun pentingnya peran sektor transpor, apalagi pada jaman modern ini, peran sektor *enerji* adalah justru lebih vital. Minyak sebagai enerji, di sektor transpor perannya menduduki tempat terpenting. Di Indonesia, khususnya di Jawa, gula pernah menempati tempat pertama sebagai bahan eksport. Eksport gula pada masa kolonialisme Belanda menduduki posisi terbesar nomor dua dalam pasaran dunia setelah Cuba. Baru pada tahun-tahun 1930-an peran gula diambil alih oleh karet dan minyak. Seterusnya justru minyak yang memainkan peran paling penting. Seorang Emil Ludwig pernah menulis yang berjudul *Perang Untuk Minyak Bumi* (Terjemahan dari bahasa Belanda: *Oorlog Om Petroleum*). Ia menggambarkan bagaimana minyak bumi berperan sebagai sumber sengketa antar negara dan antara

modal-modal besar di dunia. Imperialisme Amerika serta Inggris dengan George W. Bush dan Tony Blair sebagai wakil-wakilnya yang dengan dalih seenaknya sendiri ngotot ingin menggempur Irak mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein, adalah berlatar belakang kepentingan menguasai sumber minyak yang hasilnya kaya-raya. Meskipun tidak senilai Irak, Russia yang mempertahankan mati-matian Tschetschenia dengan peperangan adalah berlatar belakang mengangkangi kekuasaan yang bertumpu pada kekayaan sumber minyak juga di sana. Pada tahun-tahun pertama sesudah perjanjian KMB ditanda tangani, di samping pemogokan besar yang diorganisir oleh Sarbupri, di sana-sini sudah terjadi pemogokan kaum buruh. Namun larangan mogok baru dikeluarkan oleh pemerintah sesudah mengenakan industri minyak yang merupakan urat-nadi kehidupan kapital monopoli Belanda di Indonesia.

Pemerintahan Natsir yang tidak berumur panjang diganti dengan pemerintahan Soekiman. Seperti halnya Natsir, Soekiman adalah dari partai Masyumi juga. Di bawah pemerintahan Soekiman, kader-kader dan pemimpin-pemimpin kiri diuber-uber. Sebagian ada yang ditangkap dan dipenjarakan melalui *razzia Agustus 1951*. Dalam keadaan demikian, gerakan serikat buruh dengan kader-kader dan pimpinan kirinya formal mengalami kekosongan. Tantangan langsung yang bersifat memprotes larangan mogok menjadi terbelenggu. Pemerintahan Soekiman tidak juga berumur panjang. Menyusul kemudian pemerintahan Wilopo yang moderat, yang tidak lama kemudian diganti oleh pemerintahan Ali Sastroamidjojo yang lebih bisa bekerja sama dengan golongan kiri. Pemerintahan Ali Sastroamidjojo ini masih bisa dijatuhkan dan diganti oleh pemerintahan kanan Masyumi di bawah Burhanuddin Harahap yang umurnya juga tidak pan-jang. Sesudah pemilihan umum, pemerintahan kanan ini diganti dengan tampilnya kembali pemerintahan Ali Sastroamidjojo, kemudian pemerintahan Juanda dan akhirnya pemerintahan presidensiil di bawah pimpinan langsung presiden Soekarno. Selanjutnya Indonesia tidak mengenal lagi pemerintahan mulus kanan sampai munculnya kekuasaan diktatur militer Soeharto.

Dalam kisaran waktu sepuluh tahun sampai munculnya Soeharto di pentas kekuasaan, Indonesia ditandai dengan adanya hubungan

baik antara presiden Soekarno dan golongan kiri. Selama kurun waktu itu larangan mogok tetap berlaku dan protes-protes untuk pencabutannya pun tidak berkumandang. Prinsip *bersatu dan berjuang* larut ditelan sejarah. Aspek paternalisme berperan dominan. Kebebasan politik golongan kiri tidak sepenuhnya transparans. Mungkin hal itu terbawa oleh sifat ketimuran naluri feodal atau kurang cukupnya pengalaman di pihak golongan kiri.. Dampaknya menembus juga gerakan serikat buruh. Sebenarnya banyak perundingan mengenai sengketa perburuhan menemui jalan buntu. Namun untuk menghindari bentrokan dengan pemerintah, jalan kekerasan yang berupa pemogokan dihindari dan protes pencabutan undang-undang larangan mogok tidak dilakukan. Kepedulian tidak terlihat menghadapi keterbatasan kebebasan politik pemerintah Indonesia ketika itu akibat dominasi ekonomi kaum kapitalis monopoli asing. Golongan kiri termasuk pihak yang menganggap tabu terhadap pelanggaran undang-undang larangan mogok. Kenyataan di Perancis bisa diambil sebagai contoh. Ketika CGT di sana mendukung pemerintahan Lionel Jospin yang Sosialis, tidak hanya satu kali mengorganisir pemogokan. Namun dengan pemogokan itu hubungan baik antara CGT dan pemerintahan Jospin tidak terganggu, apalagi menjadi berantakan. Sasaran pemogokan bukan pemerintahan Jospin, tapi perusahaan-perusahaan kapitalis yang menindas massa kaum buruh yang diorganisir oleh CGT dan organisasi-organisasi serikat buruh lainnya yang bekerja sama dengan CGT. Keadaan di Perancis itu menggambarkan kesamaan aspek dengan di negeri-negeri Eropa Barat lainnya yang pemerintahannya berada di bawah pimpinan kaum Sosialis, kaum Sosial Demokrat atau Aliansi Tengah Kiri. Pemisahan sasaran yang demikian itu tidak dijadikan garis oleh gerakan serikat buruh Indonesia sesudah adanya larangan mogok, meskipun yang dipimpin oleh kader-kader kiri. Di Perancis memang tidak ada larangan mogok. Namun jika gerakan serikat buruh Indonesia ketika itu mengambil garis pemisah sasaran seperti di Perancis, dan tidak ada kendala karena dampak kemelutnya paternalisme, bisa digencarkan tuntutan pencabutan larangan mogok. Yang bisa dijadikan sebagai motif adalah bahwa sasaran utamanya kapitalis-kapitalis monopoli asing, kapitalis-kapitalis birokrat serta kapitalis-kapitalis domestik yang merusak kehidupan dan perkembangan ekonomi nasional. Bukan pemerintahan

Soekarno atau pemerintahan pendukung politiknya sebelumnya yang dijadikan sasaran.

Selama kurun waktu tersebut, sengketa perburuhan yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan antara serikat buruh dan majikan atau jawatan pemerintah, penyelesaiannya banyak digantungkan pada peran perantaraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), baik pusat maupun daerah. Dalam kenyataan memang tidak sedikit jumlah petugas panitia itu yang berhaluan kiri. Dengan demikian hasil penyelesaian sengketa perburuhan banyak yang relatif menguntungkan bagi kepentingan kaum buruh. Ada kalanya juga, sengketa dengan perusahaan kapitalis tertentu tidak bisa diselesaikan dengan jalan perundingan dan dengan perantaraan P4. Untuk mengatasinya ditempuh aksi ringan tanpa mengganggu proses produksi dan tidak melanggar undang-undang larangan mogok. Misalnya aksi "cerewet" di tempat kerja. Efek aksi semacam itu menimbulkan suasana riuh di tempat kerja yang bisa mengganggu ketenangan kerja dan ketenangan majikan. Bentuk aksi semacam itu berefek positif, meskipun nilai hasilnya tidak tinggi. Namun bagaimanapun juga, hasil-hasil yang relatif menguntungkan dari menggantungkan diri dan dari aksi-aksi ringan di atas, yang semuanya dicapai tanpa adanya bentrokan langsung dengan pemerintah, mempertebal ilusi yang salah di kalangan gerakan buruh dan gerakan serikat buruh Indonesia tentang hakekat kekuasaan negara. Jika di dunia Barat tidak adanya sintuhan kemiskinan hidup menjauhkan massa kaum buruh dari perjuangan revolusioner, dampak paternalisme di Indonesia berkemelut dengan lebih bergantungnya gerakan buruh dan gerakan serikat buruh pada politik pemerintah dalam pengejawantahan Soekarnoisme.

Di atas sudah disinggung, bahwa sesudah perjanjian KMB ditandatangani, pukulan dahsyat yang dialami dalam peristiwa Madiun tidak membikin gentar dan tidak menyetop bangkit kembalinya kader-kader kiri pada umumnya dalam perjuangan. Pengalaman di sektor industri minyak menunjukkan, bahwa kader-kader kiri di dalam pimpinan serikat buruh tidak terpikut oleh iming-imingan majikan tentang kedudukan. Uluran tangan pihak majikan berupa uang sogokan, jaminan mobil, penginapan di hotel kelas satu dan jaminan pesawat terbang untuk melawat ke berbagai

daerah, tidak membikin goyah iman kader-kader kiri, walaupun hidup mereka serba kurang. Jutaan uang rupiah yang dihambur-hamburkan oleh kantor pusat BPM untuk membiayai konperensi KABM, tidak membikin serikat-serikat buruh minyak yang berkonperensi menjadi aparat birokrasi majikan. Konperensi di atas malah menggiring serikat-serikat buruh minyak yang sudah dilebur dalam satu organisasi sesudah kongres, bergabung menjadi anggota SOBSI. Akibatnya, meneer Oosterhof, kepala bagian personalia kantor pusat BPM di Jakarta yang dipersalahkan. Oleh kantor pusatnya di Negeri Belanda ia lalu ditarik, dipulangkan dan disingkirkan dari jabatannya.

Terutama selama massa sejak presiden Soekarno mendengungkan "Demokrasi Terpimpin," paternalisme lebih mendampakkan aspek negatifnya. Elan perjuangan seperti yang terlihat pada masa awal sesudah perjanjian KMB ditanda tangani, tidak lagi transparans. Visi kehidupan umum sudah banyak berubah dan dampaknya menembus juga di kalangan kader-kader kiri, termasuk juga yang bertugas di bidang gerakan serikat buruh. Kedudukan di DPR-MPR serta di lembaga negara lainnya yang berfasilitas relatif baik, lebih menjauhkan hubungan sebagian dari kader-kader itu dengan rakyat dan dengan kehidupan sederhana atau serba kurang sebelumnya. Melalui kusak-kusuk dengan pejabat tinggi negara, kader kiri serikat buruh tertentu bisa meraih posisi sebagai presiden direktur, walaupun fungsinya tidak berperan menentukan bagi pengelolaan perusahaan. Pengerahan massa kaum buruh untuk rapat-rapat besar jalannya seret jika tidak ada imbalan uang. Jauh sekali bedanya dengan waktu sekitar tahun 1950-an.

Ada masalah lagi lainnya yang ada hubungannya dengan penilaian mengenai hakekat kekuasaan negara. Masalah pengambilalian dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik kaum kapitalis monopoli Belanda pada sekitar th. 1957 sebagai hasil perjuangan rakyat, banyak yang menganggap otomatis menjadi milik rakyat dan bermanfaat bagi kepentingan hidup rakyat. Sementara kader kiri ada yang beranggapan demikian juga. Namun dengan pengambilalihan dan dengan nasionalisasi itu, atas perintah Nasution, pimpinan tertinggi militer lalu dengan cepat mengambil posisi penguasaan. Di bidang industri minyak Ibnoe Soetowo sebagai wakil militer segera duduk berkuasa dan mengganti nama

perusahaan menjadi PERTAMINA. Di tangan Ibnoe Soetowo, uang berlimpahan dari hasil produksi industri minyak tidak dimanfaatkan untuk perbaikan hidup rakyat, tapi masuk ke kantong pribadi dan keluarganya. Yang disebut Badan Kerjasama Buruh dan Militer (BKS-BUMIL) adalah kulit luar yang tidak cocok dengan isi dalamnya. Di dalamnya tidak ada kerjasama dalam arti yang sebenarnya. Yang ada dominasi kekuatan militer yang berperan menentukan. Harapan terhadap menangnya aspek pro rakyat di dalam kekuasaan negara menjadi terpental. Hakekat kekuasaan negara Indonesia ketika itu menjadi lebih jelas dengan berdominasinya kekuatan militer sebagai aspek anti rakyat. Adalah aspek anti rakyat itu yang kemudian menjadi panjatan kekuasaan otoriter Soeharto.

Dengan otoriterisme Soeharto, gerakan serikat buruh dengan pimpinan kader-kader kiri diobrak-abrik dan dipunahkan dengan kekerasan senjata. Kehidupan serikat buruh di Indonesia kini memang ada, tapi pembenahan terhadapnya sangat diperlukan. Yaitu pembenahan supaya ada penentuan sasaran yang tepat. Yang diprioritaskan adalah pengorganisasian massa kaum buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan milik kapital monopoli asing, pada perusahaan-perusahaan milik kapitalis birokrat dan pada perusahaan-perusahaan yang mengelola subyek-subyek globalisasi. Pengisian kader dan pimpinan supaya melalui prosedur demokratis dan bebas dari politik pemerintah dan ketentuan-ketentuan ILO yang birokratis.

UU No. 25/ 1997 yang dilapisi dengan dalih anti kolonialisme karena dikatakan menggantikan 6 ordonansi produk kolonial, bukan sebuah undang-undang yang ideal bagi kaum buruh. Undang-undang itu yang dijiwai apa yang disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila, adalah bentuk rekayasa membikin kaburnya kontradiksi dasar antara kelas buruh dan burjuasi. Yaitu kontradiksi dasar yang tidak mencerminkan kejumbuhan antara kepentingan pokok kelas buruh dan kepentingan burjuasi sebagai pihak penghisap. Di samping itu, undang-undang tersebut yang isinya didasari juga dengan apa yang dikatakan peningkatan produktivitas, adalah bentuk penyamaran penghisapan kapitalis terhadap kelas buruh berupa nilai lebih. Itulah nilai lebih hasil kaum kapitalis memeras tenaga kaum buruh, yang berpeluang bagi

teraihnya keuntungan maksimum kapitalis.

Konvensi ILO No. 87 yang dikatakan melandaskan kebebasan dan perlindungan hak kaum buruh (Pemerintah Indonesia menyebutnya pekerja) untuk berorganisasi, bisa diinterpretasikan secara mulur-mungkret. Kebebasan berorganisasi bisa diterapkan oleh burjuasi untuk memecah-belah persatuan massa kaum buruh dalam berbagai organisai dan melemahkan kekuatan perjuangan kaum buruh. Perlindungan berorganisasi bisa berupa perlindungan burjuasi terhadap serikat buruh yang tunduk kepada politik burjuasi sebagai aparat birokrasinya. Yang lain lagi seperti Konvensi ILO No. 98. Di samping mengenai hak kaum buruh berorganiasi, juga berisi anjuran untuk berunding bersama antara kaum buruh dan majikan. Mengenai berunding bersama, kecenderungannya adalah tercapainya Perjanjian Kerja Kolektif (KKB menurut istilah sekarang di Indonesia). KKB ini menurut pengalaman praktek tidak selalu menguntungkan bagi kaum buruh. KKB yang mengikat dalam jangka waktu tertentu, pada suatu saat bisa mengerem serikat buruh untuk mengajukan tuntutan baru sebagai perbaikan, karena batas waktu berlakunya belum berakhir.

Kehidupan demokratis yang ada supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengorganisasi serikat buruh yang berpola pada satu kesatuan lapangan kerja, satu serikat buruh. Artinya satu kesatuan industri atau satu kesatuan jawatan pemerintah, satu serikat buruh. Susunan organisasinya bergantung pada struktur keorganisasian perusahaan atau jawatan pemerintah. Prinsip keorganisasiannya adalah demokratis. Pembentukannya berdasar atas kesepakatan massa kaum buruh anggota. Prinsip itu berlaku juga bagi penentuan jumlah dan cara pemungutan uang iuran. Menurut pengalaman lama, pemungutan uang iuran langsung dari anggota memang tidak bisa berjalan lancar. Namun pemungutan dengan pemotongan gaji atau upah oleh jawatan pemerintah atau perusahaan, bisa dilakukan asal ada kesepakatan massa anggota. Uang iuran anggota berperan penting sebagai dana pokok yang menghidupi serikat buruh. Dengan dana cukup yang diperoleh dari uang iuran, serikat buruh tidak bergantung pada bantuan luar yang bisa berdampak negatif karena dampak paternalisme. Prinsip keorganisasian demokratis hanya menempatkan kedudukan pimpinan dan kader petugas (fungsionaris) organisasi di luar

pekerja staf, melalui prosedur pemilihan.

Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja RI, hingga akhir oktober 1998, yang tercatat dan diakui resmi oleh Pemerintah Indonesia ada 11 organisasi serikat buruh, termasuk FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

Di samping itu ada juga Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) yang diketuai oleh Dita Indah Sari. Adalah terutama generasi muda Indonesia yang memikul beban pembaruan dan pembenahan gerakan serikat buruh. Gerakan serikat buruh Indonesia masa kini memerlukan kader-kader muda yang tekun, ulet dan militan,. Begitupun yang terampil juga memimpin serta menangani tuntutan-tuntutan jangka pendek serikat-buruh, di samping mampu mendidik dan membimbing massa kaum buruh untuk perjuangan mulia jangka panjang, membebaskan kelas buruh dari hidup tertindas dan terhisap.

Selanjutnya, terutama tuntutan-tuntutan sosial-ekonomis perlu diperhitungkan baik-baik untuk bisa berhasil sehingga menarik simpati massa kaum buruh. Sebaiknya isinya tidak usah terlalu muluk-muluk dengan semboyan *kecil hasil*. Perundingan mengenai tuntutan-tuntutan sosial-ekonomis perlu dituntaskan menjadi matang dan tidak terlalu pagi melontarkan sangsi untuk aksi yang lebih tinggi. Tergantung pada kepenting-annya, perundingan bisa hanya bertingkat lokal, tapi bisa juga bertingkat daerah dan nasional. Rapat massa dan demonstrasi adalah aksi-aksi penting sebagai penguat dukungan massa, di samping sebagai penjajagan kemungkinan aksi yang lebih tinggi. Aksi mogok tidak mesti serempak berbentuk aksi menyeluruh. Bagi kaum buruh yang terutama bekerja borongan, aksi kerja lambat-lambatan yang bisa disebut sebagai *aksi cacing*, bisa memberikan efek positif. Aksi yang termasuk kategori lebih tinggi lagi adalah seperti *aksi mogok duduk* dan *aksi mogok resonans*. Aksi mogok resonans adalah sebuah aksi pada bagian yang terpenting. Misalnya bagian penyulingan pada industri minyak yang merupakan urat nadi dan memberikan resonansi kepada bagian-bagian lainnya meskipun yang tidak langsung beraksi. Adapun yang lebih tinggi lagi dan paling luas adalah *aksi mogok sinkron*, yaitu aksi menyeluruh yang meliputi semua bagian. Semua aksi mogok tadi, seperti halnya perundingan,

tidak hanya terbatas sebagai aksi lokal saja, tapi bisa juga merangkumi lingkungan daerah dan wilayah tingkat nasional. Meskipun agak langka, pada tingkat internasioal pun bisa dilakukan aksi juga. Pada tingkat internasional, umumnya berbentuk aksi boikot seperti memboikot bongkar-pasang barang-barang muatan (*cargo*) kapal sebagai pernyataan solidaritas. Ini tadi adalah kategori-kategori aksi yang bentuknya masih bisa dikaji dan dikembangkan berdasarkan syarat-syarat obyektif yang dihadapi. Aksi kesatuan dalam satu lapangan kerja yang meliputi lebih dari satu organisasi serikat buruh bisa dipertimbangkan, jika memang kenyataan obyektif memerlukannya. Bentuk-bentuk aksi dari kerja lambat-lambatan sampai pada aksi mogok sinkron dan aksi boikot adalah yang langsung menyintuh proses produksi. Beda dengan aksi "cerewet" seperti yang sudah disebut di atas.

Di atas adalah aksi-aksi bertema sosial-ekonomi. Yang lebih tinggi lagi adalah aksi politik, yang meskipun bentuknya sama, seperti misalnya aksi mogok, tapi temanya berbeda. Walaupun tema aksi yang diambil politis, karena tidak merombak struktur masyarakat seperti menuntut penggantian pemerintahan, serikat buruh masih bisa menanganinya dan massa luas kaum buruh yang berbeda agama, pandangan hidup, kategori ethnik, aliran politik dan nasionalitas, masih bisa mendukungnya. Jika sudah memasuki aksi revolusioner mengubah sistem masyarakat, komposisi massa kaum buruh sebagai partisipan sudah bisa berubah. Di dalam aksi revolusioner, serikat buruh tidak langsung ambil bagian, meskipun ada kaitannya karena mengorganisasi massa kaum buruh. Adalah partai kelas buruh yang bertugas memimpin dan memobilisasi massa kaum buruh dari hasil reform gerakan serikat buruh untuk aktif ambil bagian dalam perjuangan revolusioner. Bagi negeri seperti Indonesia, perjuangan itu adalah perjuangan bertahap. Tahap pertama adalah memasuki revolusi demokratis membongkar sisa-sisa feodalisme dan meramu syarat-syarat untuk membangun Sosialisme. Tahap kedua membongkar sisa-sisa kapitalisme dan membangun Sosialisme. Dua tahap tersebut adalah tahap-tahap revolusi. Bergantung pada kondisi obyektif masing-masing negeri, bisa ditempuh juga tahap atau tahap-tahap suplementer lainya sebelumnya di luar kategori tahap revolusi. Misalnya tahap menegakkan pemerintahan koalisi demokratis. Adapun dalam aksi revolusioner, massa kaum buruh yang aktif berpartisipasi adalah

yang sudah meningkat kesedaran mereka sebagai kelas buruh. Yaitu yang sudah meyakini diri bahwa masyarakat kapitalis bukan tempat mereka berlindung untuk hidup. Pada tahun 1964, SOBSI membuka Sekolah Sentral yang diikuti oleh kader-kader tertinggi serikat buruh anggota. Dengan Sekolah Sentral itu, bertugas beberapa kader sentral SOBSI sebagai guru. Yang dikuliahkan tidak hanya terbatas pada bagaimana menangani perjuangan jangka pendek. Yaitu perjuangan menanggulangi perbaikan-perbaikan sosial-ekonomi bagi kepentingan langsung massa kaum buruh dan perjuangan yang ada sangkut-pautnya dengan kehidupan politik aktual. Tentang perjuangan jangka panjang dikuliahkan juga, yang ditandaskan pada pentingnya membangun Sosialisme Ilmiah. Jalan menuju Sosialisme bukan yang berpola jalan damai mutlak seperti keputusan Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) di bawah pimpinan Chrusjtjov.

Canang terhadap kemungkinan berjangkitnya oportunisme yang berbentuk reformisme yang bisa menjangkiti kader-kader dan pemimpin-pemimpin gerakan serikat-buruh, juga dikuliahkan. Terutama bahaya berjangkitnya reformisme yang berupa kelibatan kegiatan yang terbatas pada niveau reform atau tambal-sulam.

Dengan telah gugurnya Uni Soviet dan negara-negara Sosialis Eropa Timur, begitu juga dengan menggebunya restorasi kapitalisme di Tiongkok, tidak sedikit orang yang jenu karena mengikuti perjuangan panjang dengan pahit-getir tanpa ada buahnya. Ada sementara orang yang pernah mengikuti gerakan revolusioner malah mentertawai pendirian seseorang yang masih tidak mau mundur dalam perjuangan untuk Sosialisme. Yang disebut belakangan ini pada umumnya tidak pernah merasakan pahit-getirnya hidup. Misalnya bekerja manual sebagai buruh industri yang cukup berat dan membikin aus kekuatan phisik. Hal itu adalah kenyataan yang tidak saja terjadi di negeri-negeri yang industrinya belum maju, tapi juga di negeri-negeri Barat yang sudah maju industrinya. Visi hidup mereka hanya didasari dengan pengalaman dan pengelihatan sempit intelektual yang subyektif dan sepihak. Derita dan kesengsaraan hidup orang banyak karena kebenaluan kapitalisme, tidak menyintuh perasaan mereka. Mereka tidak ada kepedulian memikirkan alternatif lain di dalam kehidupan yang bebas dari penindasan, penghisapan dan

penderitaan hidup. Mereka menganggap sepi, bahwa di dunia ini ada imperialisme yang berada di bawah dominasi imperialisme Amerika. Yaitu imperialisme sebagai sumber penindasan dan penghisapan kapitalis, sumber peperangan, sumber kekuatan perampas kekayaan dan pengeberi kebebasan politik negeri lain, serta sumber provokasi terorisme. Maka sebagai alternatif lain adalah urgen untuk memasuki tahap pertama revolusi dengan menegakkan negara demokratis yang berdiri mandiri sebagai langkah pertama. Meskipun belum sepenuhnya bebas dari hubungan produksi kapitalis, negara demokratis yang dibentuk bertumpu pada kekuatan persatuan nasional demokratis dengan kelas buruh sebagai tulang punggung yang bersatu dengan kaum tani. Adanya negara demokratis yang berpola demikian penting untuk dikembangkan meliputi banyak negeri yang mempunyai hubungan kerjasama dan saling bantu. Negara-negara demokratis kategori demikian yang bisa berhasil dikembangkan, berperan meramu bersama syarat-syarat yang cukup bagi penegakan Demokrasi sejati sebagai kekuasaan politik yang berpadu dengan Sosialisme. Di samping itu dengan bahu-membahu penting juga mengakhiri superioritas politik, ekonomi dan militer imperialisme dengan imperialisme Amerika sebagai biang keladinya, dan dalam kesatuan tindakan mencegah bersama gagalnya pembangunan Sosialisme. Sejarah jangan sampai terulang kembali seperti gugurnya Uni Soviet, negara-negara Sosialis Eropa Timur dan restorasi kapitalisme di Tiongkok. Hanya dengan alternatif demikian, jalan bisa terbuka bagi kebebasan hidup manusia dari penindasan dan penghisapan. Adalah Sosialisme yang mempunyai syarat mengantar kehidupan rakyat pada kesejahteraan serta perdamaian yang kekal dan abadi di dunia.

Kepustakaan

Georgi Dimitrov, The Tasks of the Trade Unions, *Selected Works* Vol. 1, Sofia 1972.

David North, *Marxism and the Fundamental Problems of the 20th Century*, Sydney, January 3-10, 1998.

Payaman J. Simanjuntak, *Perkembangan Organisasi Pekerja di Indonesia*, 06-12-2001.

Supeno, *Sejarah Singkat Gerakan Rakyat untuk Kebebasan*, 17-8-1982.

V.I. Lenin, *"Left-Wing" Communism, An Infantile Disorder*, Foreign Languages Press, Peking 1975.

Politische Ökonomie Des Kapitalismus, Lehrbuch, Dietz Verlag Berlin 1980.

Alec Gordon, "Ideologi, Ekonomi dan Perkebunan," *Prisma* 7, Juli 1982.

"14th World Trade Union Congress," New Delhi, India 25 to 28 March 2000.

"Politik Trade Unionis dan Politik Sosial Demokratis," *Indomarxist* 29-04-2002.

Brief History of the Communist Party of India, CPI Central Office, 05-07-2002.

KCTU – Struggle for Labor Law Reforms: Campaign News III, Korean Confederation of Trade Unions, 30-05-2002.

Manifesto of the Democratic Labor Party, Democratic Labor Party of South Korea, 30-05-2002.

Japan Labor Unions, Data as of January 1994.

Déclaration commune CFDT-CGT-UNSA-FSU, le 23 avril 2002.

Déclaration Commune des Organisations Syndicales Francaises, CGT, CFDT, UNSA, FO, CFTC, Members de la CES, Fait le 15 avril 2002.

The Nation and its History—Advances and Setbacks, DGB-Bundesvorstand 2000.

"The Party and the COBAS," *Communist Left*, No. 1, July-December, 1989.

Theses on the Trade Unions in Britain, International Library of the Communist Left, 06-07-2002.

"Dutch opposition parties win big in elections," *USATODAY*, 07-07.2002.

Susan George, *A Short History of Neoliberalism*, 30-05-2002.

Walter P. Reuther and Jacob J. Kaufman, *"Trade Unions in the United States"*, Microsoft Encarta 98 Encyclopedia 1993-1997.

Communist party, in the United States, The Columbia Encyclopedia, Sixt Edition, 2001.

Sidney James and Beatrice Webb, Microsoft Encarta 98 Encyclopedia 1993-1997.

Morris Weisz, *Trade Union*, Microsoft Encarta 98 Encyclopedia 1993-1997.

"*Guild Socialism*," Microsoft Encarta 98 Encyclopedia 1993-1997.

"How the ALP and Bill Kelty Wrecked the Unions," The Whitlam Era: Labor's Last Gasp Citizen's Electoral Council, 10-10-2002.

Tess Lee Ack, *Australian Unions and Indonesia's Struggle for Independence*, Rupert Lockwood's book, Black Armada.

Melanie Sjoberg, "Trade unions break with the ALP," *Green Left Weekly Home Page*.

"Why we must defend the maritime workers," *RESIST*, 17-09-2002.

Socialists and the Australian Labor Party, *Socialists and the trade unions,* Program of the Democratic Socialist Party, 17-09-2002.

EILER, *Pendidikan Buruh Dalam konteks Serikat Buruh Sejati*, Edi Cahyono's Page.